

**PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT
BERBASIS POTENSI WILAYAH PESISIR
DI KOTA PAREPARE**

*SEA FISHERY DEVELOPMENT
BASED ON COASTAL REGION POTENTIAL
OF PAREPARE*

ULFAH DJAMALUDDIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT
BERBASIS POTENSI WILAYAH PESISIR
DI KOTA PAREPARE**

*SEA FISHERY DEVELOPMENT
BASED ON COASTAL REGION POTENTIAL
OF PAREPARE*

ULFAH DJAMALUDDIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT
BERBASIS POTENSI WILAYAH PESISIR
DI KOTA PAREPARE**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

ULFAH DJAMALUDDIN

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2007

TESIS

PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT BERBASIS POTENSI WILAYAH PESISIR DI KOTA PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

ULFAH DJAMALUDDIN

Nomor Pokok P0200204512

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 23 Juni 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Dadang. A. Suriamihardja, M.Eng

Ketua

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah

Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Roland A. Barkey, DEA

Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc

ABSTRAK

ULFAH DJAMALUDDIN. *Pengembangan Perikanan Laut Berbasis Potensi Wilayah Pesisir Di Kota Parepare* (dibimbing oleh D. A. Suriamihardja dan Jamaluddin Jompa).

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menilai potensi yang dimiliki oleh Wilayah pesisir dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut di Kota Parepare tangkap, dan (2) untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir khususnya perikanan tangkap yang menjadi mata pencaharian nelayan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pantai Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan penyebaran daftar isian pertanyaan (kuisisioner) kepada nelayan tangkap sebagai responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil sampel sebanyak 15% populasi, sehingga sampel yang digunakan sebanyak 50 RTP Tangkap. Teknis penarikan sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan tabulasi dan persentase yang dilanjutkan dengan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Parepare memiliki potensi sebagai kota pantai dengan letak yang strategis, aksesibilitas yang lancar dan potensi keberadaan LAPAN dan industri yang bergerak disektor perikanan. Adapun hambatan yang hadapi nelayan tangkap yakni pendidikan yang rendah, pendapatan yang rendah, alat tangkap dan perahu/kapal yang digunakan masih bersifat tradisional, keterbatasan alat tangkap yang dimiliki nelayan, kemungkinan terjadinya bencana alam dan terjadi kenaikan harga dan kelangkaan BBM. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan perikanan laut khususnya perikanan tangkap, guna peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan tangkap antara lain; strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi pengembangan infrastruktur dan strategi kebijakan pemerintah.

ABSTRACT

ULFAH DJAMALUDDIN. *Sea Fishery Development Based on Coastal Region Potential of Pare-pare* (supervised by D. A. Suriamihardja and Jamaluddin Jompa).

The objectives of the study are 1) to assess the potential of the coastal region and the obstruction it may have in the development of sea fishery of Pare-pare City, 2) To describe the development strategy of coastal potential based sea fishery particularly traditional fishery which becomes the main source of their livelihood.

The study is carried out in the coastal area of Pare-pare. The research applies qualitative-descriptive method. Questionnaires are distributed to a sample of 50 fishermen, which is 15 percent of the population selected by simple random sampling. The data are qualitatively described by proportion, tabulation and SWOT analysis.

The study indicates that, as a coastal city, Pare-pare is located in a strategic position, easily accessible, and has a potential existence of both a national aeronautics and space agency and an industry in the fishery sector. The obstacles that the traditional fisherman face are the poor educational background, poor income, the simple boats and traditional equipments, possible natural calamity, and scarcity of petroleum. The strategies that can be used in the development of sea fishery, particularly traditional one so that the fisherman's welfare and production increase are human resource development strategy, infrastructure development strategy and government policy strategy.

P R A K A T A

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan hasil penelitian ini dapat selesai, meskipun tidak tertutup kemungkinan masih terdapat berbagai kekurangan di dalamnya.

Penelitian ini berjudul "*Pengembangan Perikanan Laut Berbasis Potensi Wilayah Pesisir di Kota Parepare*", dilatarbelakangi dengan tajuk permasalahan yang timbul dari kehidupan masyarakat pesisir, dalam hal ini nelayan tangkap yang terpuruk dengan kemiskinan dalam keseharian mereka. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif menggunakan teknik SWOT sebagai alat analisis.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, namun berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. D. A. Suriamiharja, M.ENG dan Bapak Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Ketua dan Anggota Komisi Penasihat, atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah turut membantu, teristimewa khususnya kepada kedua orang tua

dan adik-adikku tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan doa yang tulus dalam menyelesaikan pendidikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa perbaikan hasil diperoleh masih harus terus disempurnakan, sehingga masukan dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna melengkapi penulisan ini. Atas saran dan kritiknya kami mengucapkan terima kasih.

Makassar, Juni 2007
Penulis,

ULFAH DJAMALUDDIN

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ULFAH DJAMALUDDIN

Nomor Mahasiswa : P0 200204512

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Juni 2007

Yang menyatakan,

ULFAH DJAMALUDDIN

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Wilayah	12
B. Konsep Pengembangan Wilayah	16
C. Batasan Wilayah Pesisir	17
D. Lingkungan Sosial Wilayah Pesisir dan Nelayan	19
E. Karakteristik Masyarakat Pesisir/Nelayan	21
F. Kerangka Pemikiran	24

III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Definisi Operasional	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Kota Parepare	40
B. Keadaan Umum Pesisir Pantai Kota Parepare	45
C. Potensi Perikanan Laut Kota Parepare	49
D. Karakteristik Responden	61
E. Pendidikan Nelayan Tangkap	66
F. Pendapatan Nelayan Tangkap	69
G. Aktivitas Penangkapan Ikan	72
H. Strategi Pengembangan Perikanan Laut.....	85
V. PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Daftar pertanyaan untuk kuisisioner	111
2. Pedoman wawancara dengan responden aparat pemerintah daerah	115
3. Pedoman wawancara dengan responden nelayan tangkap	117
4. Hasil kuisisioner berdasarkan karakteristik responden	118
5. Hasil kuisisioner berdasarkan pendapatan responden	120
6. Hasil kuisisioner berdasarkan sarana alat tangkap dan transportasi yang digunakan responden	125
7. Hasil kuisisioner berdasarkan sarana TPI/PPI yang digunakan responden	127
8. Daftar industri perikanan Kota Parepare	129
9. Daftar nama kapal nelayan dan kebutuhan BBM (solar) untuk PPI Cempae Kota Parepare Tahun 2006	130
10. Banyaknya alat tangkap perikanan berdasarkan kecamatan dan jenisnya di Kota Parepare Tahun 2005	132
11. Banyaknya Rumah Tangga Perikanan (RTP) berdasarkan kecamatan dan jenisnya di Kota Parepare Tahun 2005	133

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Matriks SWOT.....	33
2. Jumlah rumah tangga dan penduduk per kecamatan.....	43
3. Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Parepare	43
4. PDRB berdasarkan atas dasar harga berlaku (Jutaan Rupiah) Kota Parepare Tahun 2003 – 2004	44
5. Jumlah rumah tangga dan penduduk per kecamatan dan kelurahan di wilayah pesisir Kota Parepare	47
6. Perkembangan produksi perikanan Kota Parepare Tahun 2003 – 2005.....	53
7. Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin	62
8. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan	63
9. Jumlah anggota keluarga responden	64
10. Tingkat pendidikan responden	67
11. Besar biaya pendidikan yang dibutuhkan responden	68
12. Tingkat pendapatan responden setiap bulan	70
13. Pengalaman kerja responden	71
14. Intensitas penangkapan ikan oleh iesponden	72
15. Waktu operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh responden	74
16. Besar biaya yang dibutuhkan responden dalam melakukan penangkapan ikan	75
17. Banyaknya hasil tangkapan yang diperoleh responden setiap kali melakukan penangkapan ikan	77

18. Jenis alat tangkap yang digunakan responden	79
19. Jenis perahu yang digunakan responden	80
20. Lokasi pemasaran hasil tangkapan responden	81
21. Matriks SWOT, Strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare pada bidang pengembangan sumber daya manusia .	97
22. Matriks SWOT, Strategi pengembangana perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare pada bidang pengembangan infrastruktur	100
23. Matriks SWOT, Strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare pada bidang kebijakan pemerintah	104

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Kerangka Pikir Penelitian	26
2.	Peta Wilayah Administrasi Kota Parepare	28
3.	Denah Pembangunan PPI Cempae Kota Parepare	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan sebuah kota dalam suatu wilayah pengembangan sangat penting dan strategis sebagai tempat berbagai aktivitas masyarakat secara dinamis terus berlangsung sehingga merupakan faktor utama dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan daerah sekitarnya (hinterland). Dengan demikian, sebuah wilayah kota dapat dipandang sebagai pusat berbagai pelayanan. Kota-kota besar di dunia pada umumnya berawal dari tepian air. Potensi air sebagai infrastruktur transportasi tertua dan termurah menurut sejarah mendorong tumbuhnya kota pantai di berbagai wilayah.

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan lebih dari 17.000 pulau, dan panjang pantai sekitar 81.000 km. Sebagai wilayah tropis, perairan laut pesisir Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, merupakan modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional.

Wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah di permukaan bumi yang sangat menjanjikan. Interaksi antara daratan dan lautan menjadikannya suatu wilayah yang unik secara geologi, ekologi, dan

biologi dan juga sangat penting bagi berbagai bentuk kehidupan darat dan laut, termasuk manusia. Nilai penting dan manfaat wilayah pesisir sesungguhnya tidak dapat dinyatakan dengan mudah. Wilayah ini merupakan wilayah yang paling produktif dan dapat diakses oleh manusia, ketersediaan ikan dan berbagai makanan dari laut lainnya telah menjadi bahan makanan yang penting bagi jutaan orang di seluruh dunia, juga ribuan kegiatan budidaya pesisir dan industri yang ada telah menghidupi ribuan komunitas-komunitas masyarakat pesisir.

Kawasan pesisir Kota Parepare merupakan salah satu wilayah kota yang terus berkembang. Hal tersebut didukung oleh letak pada jalur utama lalu lintas darat Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat dan lalu lintas laut regional, nasional ditambah ke Tawao Malaysia yakni Pelabuhan Nusantara serta Pelabuhan Cappa Ujung dengan Pelabuhan perahu tradisional dekat kompleks gerbang niaga dan Pasar Lakessi Soreang. Keberadaan jalur lalu lintas darat dan laut ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk khususnya yang berada di kawasan pesisir.

Penduduk yang berdiam pada kawasan ini bersifat heterogen terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang kegiatan penduduknya berkembang secara dinamis. Kondisi tata bangunan di kawasan pesisir berkembang kurang teratur. Beberapa bangunan tidak mengikuti peraturan garis sempadan pantai sehingga tidak tertata dengan baik

sehingga diperlukan pengamanan sempadan pantai untuk mengantisipasi pemanfaatan lahan yang berkembang sangat cepat dan pada suatu saat akan berkembang ke arah pantai.

Kota Parepare terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi dengan teluk di sebelah barat dan perbukitan di sebelah timur. Kawasan pesisir Kota Parepare merupakan salah satu wilayah kota yang terus berkembang dengan jarak 100 m dari garis tertinggi ke arah darat dan daerah pantai dangkal dengan kedalaman sampai dengan 1,5 m waktu pasang. Kota Parepare dengan wilayah pesisimya, secara administrasi mencakup bagian dari:

1. Kecamatan Soreang terbagi atas 7 kelurahan dengan 3 kelurahan yang berada di kawasan pesisir antara lain Kelurahan Kampung Pisang, Watang Soreang dan Lakessi.
2. Kecamatan Ujung terbagi atas 5 kelurahan dengan 3 kelurahan yang berada di kawasan pesisir antara lain Kelurahan Labukkang, Mallusetasi dan Ujung Sabbang.
3. Kecamatan Bacukiki terbagi atas 9 kelurahan dengan 5 kelurahan yang berada di kawasan pesisir antara lain Kelurahan Lumpue, Sumpang Minangae, Cappa Galung, Tiro Sompe dan Kampung Baru

Berdasarkan Data Statistik Kota Parepare dalam angka Tahun 2004/2005, jumlah penduduk Tahun 2003 berjumlah 113.161 jiwa, Tahun 2004 berjumlah 115.406 jiwa dan Tahun 2005 berjumlah 118.266 jiwa

atau 24.148 Kepala Keluarga. Sesuai dengan data tersebut, maka penduduk Kota Parepare mengalami penambahan setiap tahunnya. Sedangkan Data Penduduk Miskin di Kota Parepare berjumlah 5.690 Kepala Keluarga dengan penduduk miskin yang berada di kawasan pesisir berjumlah 2.741 Kepala Keluarga (Penduduk miskin kawasan pesisir \pm 48% dari jumlah seluruh penduduk miskin yang ada di Kota Parepare).

Daerah datar di pesisir cukup tinggi tidak cukup lebar sehingga kepadatan bangunan di pesisir yang merupakan kota lama sangat tinggi. Penduduk termasuk migran yang datang dari daerah lain yang bekerja di kota lama sebagian besar bertempat tinggal di sekitar daerah perdagangan yang terdapat di wilayah pesisir.

Masyarakat pesisir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di wilayah pesisir. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah pesisir yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut akan memberikan pengaruh terhadap kebutuhan hidup mereka. Untuk mengatasi permintaan kebutuhan yang terus meningkat, perlu diikuti dengan kenaikan jumlah produksi, dan untuk itu diperlukan teknologi industri yang memadai, baik kualitas dan kuantitas, serta tenaga atau sumber daya manusia yang berkualitas (tingkat pendidikan).

Krisis ekonomi yang melanda, sehingga terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin. Berdasarkan pengamatan sementara,

penduduk yang termasuk dalam kategori miskin bermukim sebagian besar di kawasan pesisir pantai Kota Parepare dengan mata pencaharian sebagai nelayan dengan pendapatan tidak tetap, tergantung pada kegiatan menangkap ikan, hal ini dapat diketahui dari jumlah penerima beras miskin.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Sebagai realisasinya Pemerintah Kota Parepare telah membuat Daftar Inventarisasi Kewenangan dan Urusan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada di setiap bidang dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga tidak terpuruk dalam kemiskinan yang berkepanjangan.

Dari deskripsi kondisi permasalahan tersebut di atas, menjadi obyek yang menarik dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengembangan Perikanan Laut Berbasis Potensi Wilayah Pesisir di Kota Parepare".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa sajakah potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut di Kota Parepare?
2. Bagaimanakah strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menilai potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut di Kota Parepare
2. Untuk menemukan strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare untuk meningkatkan taraf kehidupan nelayan tangkap.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mendukung pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakatnya.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan wilayah khususnya pengembangan di sektor perikanan laut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir serta sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti selanjutnya.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi menurut ruang lingkup analisis dan pembahasan, meliputi: 0000000

1. Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pantai Kota Parepare, dengan analisis mengenai potensi wilayah yang terdapat dalam wilayah pesisir Kota Parepare antara lain: Sumber Daya Manusia yakni Masyarakat Pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap berdasarkan tingkat pendidikan dan pendapatannya, ketersediaan dan penggunaan sarana berupa Alat tangkap (jenis,

kapasitas dan jumlahnya), perahu/kapal, PPI/TPI dan Industri yang bergerak di sektor perikanan laut.

2. Membahas mengenai strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

- a. La Ode Ilham (2004) yang berjudul Strategi Perbaikan Ekonomi Masyarakat Nelayan Kecamatan Lakudo di Kabupaten Buton mengemukakan bahwa Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan dapat dilakukan dengan melalui 1)Peningkatan Sumber Daya Manusia seperti penyuluhan, pendidikan dan pelatihan 2)Peningkatan Modal dalam bentuk penggunaan teknologi 3)Peningkatan kemampuan mengorganisasikan diri melalui lembaga-lembaga produktif 4)Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, upaya pemerintah daerah setempat membantu dan memperluas jaringan informasi serta pengelolaan kawasan konservasi laut secara terpadu. Adapun harapan ke depan La Ode Ilham menghendaki bahwa pengembangan yakni perlu adanya pembentukan Sumber Daya Manusia dengan tingkat kompetensi dan kapasitas memadai dalam mengelola sumber daya kelautan, pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan optimalisasi pemanfaatan

sumber daya kelautan di wilayah pesisir dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan sehingga memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan.

- b. Arifuddin (2004) yang berjudul Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Wilayah Pesisir di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai mengemukakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah tinggi (di atas UMR Propinsi Sulawesi Selatan), namun ketimpangan distribusi pendapatan cukup besar/belum merata, faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha masyarakat nelayan yaitu faktor modal/dana, prasarana dan sarana penangkapan, Sumber daya Manusia, Kelembagaan/hukum serta budaya masyarakat, peranan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan masyarakat nelayan cukup berperan (tinggi). Bantuan penyuluhan, teknis dan modal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Sedangkan bantuan pemasaran mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan tangkap. Adapun harapan ke depan Arifuddin menghendaki bahwa perubahan pola pikir atau pemberdayaan masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun informal sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha secara mandiri. Dengan

begitu dapat diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas usaha/pendapatan, daya beli masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta perlu intervensi pemerintah dan lembaga non pemerintah secara terpadu dalam memberikan bimbingan dan motivasi serta kemudahan dalam memperoleh sarana produksi/penangkapan terutama nelayan buruh sehingga mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya.

- c. Mukhlis Isma (2002) yang berjudul Faktor Penghambat Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sinjai mengemukakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Sinjai masih sangat rendah yang tercermin dari tingkat pendidikan serta pendapatan dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup besar sehingga masyarakat pesisir dikategorikan masyarakat miskin. Faktor penyebab kurang berkembangnya kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir adalah ketergantungan nelayan buruh terhadap nelayan pengusaha dalam kelompok kerja nelayan serta sistem bagi hasil dalam lembaga kenelayanan, kurangnya keberanian para nelayan untuk mengambil resiko dalam pengembangan usaha secara mandiri dan kondisi sosial budaya yang tercermin dalam pandangan tentang makna hidup, fungsi kerja, kemapanan ideal, dasar keberhasilan usaha dan penggunaan uang berlebih, belum banyak berubah. Faktor-faktor tersebut menjadi sebab terhadap lemahnya motivasi dan etos kerja mereka. Adapun

harapan ke depan Mukhlis Isma menghendaki bahwa perubahan pola pikir nelayan melalui pendidikan formal maupun informal, upaya perbaikan sistem kelembagaan antara nelayan buruh dengan dan nelayan pengusaha sehinggan tercipta hubungan saling menguntungkan bukan ketergantungan dan perlu adanya intervensi pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam memberikan bimbingan, motivasi dan kemudahan dalam memperoleh sarana produksi.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha masyarakat nelayan dalam peningkatan pendapatan yaitu faktor modal/dana, prasarana dan sarana penangkapan, SDM, Kelembagaan/hukum serta budaya masyarakat, ketergantungan nelayan buruh terhadap nelayan pengusaha dalam kelompok kerja nelayan serta sistem bagi hasil dalam lembaga kenelayanan, kurangnya keberanian para nelayan untuk mengambil resiko dalam pengembangan usaha secara mandiri serta peranan pemerintah sebagai fasilitator peningkatan SDM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Wilayah

Rupert Vance dalam Amar (2004) mengemukakan pengertian wilayah adalah suatu daerah (area) homogen yang mempunyai karakteristik fisik dan kultur yang berbeda dengan daerah sekitarnya. Sebagai bagian dari wilayah nasional, suatu wilayah terbentuk dari adat istiadat dan cita-cita khas yang dimiliki oleh wilayah tersebut sehingga menjadi satu identitas yang berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Djoko Sutarto (1998) membedakan pengertian antara wilayah, daerah dan kawasan sebagai berikut:

1. Wilayah, adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis, seperti Wilayah Aliran Sungai (WAS), wilayah pantai dan wilayah negara.
2. Daerah, adalah suatu wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial yang pengertian, batasan serta perwatakannya didasarkan kepada wewenang administrasi pemerintahan yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu, seperti daerah provinsi, kota dan kabupaten.

3. Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertian, batasan dan perwatakan fungsional secara tersendiri, seperti kawasan industri, kawasan pusat kota dan kawasan pemukiman

Budiharsono dalam Arifuddin (2004) mengemukakan, bahwa wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Lebih lanjut diuraikan, wilayah menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Wilayah Homogen, adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama, misalnya dalam hal ekonomi, geografis, agama, suku dan sebagainya.
2. Wilayah Nodal, adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (hinterland). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang atau jasa ataupun komunikasi dan transportasi. Batas wilayah nodal ditentukan sejauhmana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya.
3. Wilayah Administratif, adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintah atau politik seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RW/RT.

Soekirno (dalam Budiharsono, 2001) mengemukakan dalam kaitan dengan pembangunan wilayah, maka pengertian wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan, disebabkan dua faktor yaitu :

- a. Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah. Dengan demikian, lebih praktis apabila pembangunan wilayah didasarkan pada satuan wilayah administrasi yang telah ada.
- b. Wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan atas satuan administrasi pemerintahan lebih mudah dianalisis, karena sejak lama pengumpulan data di berbagai wilayah berdasarkan pada satuan wilayah administrasi tersebut.

Namun dalam kenyataannya, pembangunan tersebut seringkali tidak hanya dalam satuan wilayah administrasi, sebagai contoh adalah pengelolaan pesisir dengan pengelolaan daerah aliran sungai yang batasannya bukan berdasarkan administrasi namun berdasarkan batas ekologis dan seringkali lintas batas wilayah administrasi sehingga penanganannya memerlukan kerjasama dari satuan wilayah administrasi yang terkait.

4. Wilayah Perencanaan, adalah wilayah yang memperhatikan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah

perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sosial. Wilayah perencanaan bukan hanya dari aspek fisik dan ekonomi, namun ada juga dari aspek ekologis.

Wilayah pesisir dari konsep wilayah dapat dikategorikan termasuk dalam keempat jenis wilayah tersebut. Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah yang memproduksi ikan dalam hal ini penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan, namun dapat dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya tergolong di bawah garis kemiskinan. Sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang, sedangkan daerah perkotaan sebagai intinya. Sebagai wilayah belakang, wilayah pesisir merupakan penyedia input (pasar input) bagi inti dan merupakan pasar barang-barang jadi (output) dari inti. Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir dapat berupa wilayah administrasi yang relatif kecil yaitu kecamatan atau desa, namun dapat juga berupa kabupaten/kota. Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan dengan kriteria ekologis.

B. Konsep Pengembangan Wilayah

Amar (2004) mengemukakan bahwa “Pengembangan” dan “Pembangunan” mempunyai arti yang sedikit berbeda, namun dalam praktiknya sering dipergunakan untuk menjelaskan hal yang sama. Keduanya merujuk pada kata “*development*”. “Pembangunan” menjelaskan suatu kegiatan untuk mengadakan sesuatu yang baru dan belum ada sebelumnya, sedangkan “pengembangan” menjelaskan kegiatan untuk memperluas sesuatu yang sudah ada. Jadi pengembangan merupakan tahap lanjutan dari pembangunan.

Menurut Sujarto (1990) bahwa secara umum dapat diidentifikasi sejumlah determinan atau faktor - faktor yang berpengaruh dalam menentukan perkembangan wilayah perkotaan mencakup:

1. Faktor Sosial

Dua faktor sosial utama yang sangat berpengaruh dan menentukan pengembangan dan perkembangan kota umumnya adalah: faktor kependudukan dan kualitas kehidupan masyarakat.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang berpengaruh dan menentukan di dalam perencanaan dan pembangunan kota adalah: kegiatan usaha, politik dan ekonomi.

3. Faktor Lahan

Dua hal dari faktor pertanahan yang berpengaruh dan menentukan di dalam perencanaan dan pembangunan adalah pola penggunaan lahan dan harga lahan.

C. Batasan Wilayah Pesisir

Menurut Supriharyono (2000) Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Kedua definisi wilayah pesisir tersebut di atas secara umum memberikan gambaran besar, betapa aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi sangat kompleks di wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti

perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang terdapat di wilayah pesisir.

Kawasan pesisir sebagai suatu satuan wilayah pengembangan merupakan wadah berkembangnya suatu wilayah yang dicerminkan oleh interaksi kegiatan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya (sumber daya alam dan sumber daya buatan) pada ruang kawasan yang bersangkutan. Interaksi sumber daya dalam bidang ekonomi, sosial dan lainnya, interaksi dan perilaku dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya sikap pelaku petani dan nelayan dan penerapan teknologi. Makin maju dan terampil petani dan nelayan serta makin maju teknologi (sarana dan prasarana) yang diterapkan, maka wilayah pengembangan (kawasan pesisirnya) makin luas pula (Rahardjo Adisasmita).

Batasan wilayah pesisir memberikan pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (interface) antara ekosistem darat atau laut serta memiliki

potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumber daya tersebut menimbulkan daya tarik dari berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya dan berbagai instansi untuk menangani pemanfaatannya.

Untuk batasan wilayah antara Kota Parepare dengan kabupaten yang berada di sekitarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, namun sampai saat ini batas wilayah antara Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare dengan Kabupaten Sidenreng Rappang masih menunggu hasil Topografi Kodam VII Wirabuana selaku pelaksana pelacakan di lapangan, sedangkan batas wilayah antara Kota Parepare dengan Kabupaten Barru belum dilakukan pelacakan disebabkan oleh keterbatasan dana untuk pelaksanaan pelacakan wilayah tersebut.

D. Lingkungan Sosial Pesisir dan Nelayan

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati ketiga terbesar di dunia, juga memiliki keragaman etnis dan budaya yang menciptakan keragaman lingkungan sosial di Indonesia. Selain pengalaman sejarah dan dinamika masyarakat yang berbeda, terbentuknya keragaman lingkungan sosial juga disebabkan kondisi geografis dan ragam ekosistem yang ada. Dengan memperhatikan hal tersebut, keragaman lingkungan sosial di Indonesia, dapat dilihat berdasarkan lokalitas/geografis dibagi

menjadi lingkungan sosial pesisir dan pedalaman atau perairan dan daratan (Makarín Nabel).

Dalam pendekatan geografis – budaya lingkungan sosial pesisir secara umum mencakup kesatuan hidup manusia yang berdiam dan mengembangkan kehidupan sosial di daerah yang relatif dekat ke laut, dalam kategori lingkungan sosial pesisir adalah masyarakat yang berdiam di daratan dekat dengan laut dan masyarakat yang secara khas menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di atas perairan laut. Komunitas perairan laut memiliki ketergantungan hidup kepada sumber daya alam daratan juga sama besarnya dengan ketergantungan kepada sumber daya perairan.

Indonesia merupakan Negara kepulauan tetapi hanya sebagian kecil saja dari penduduknya yang berdiam, hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir. Berdasarkan hubungan, adaptasi dan pemahaman terhadap daerah pesisir dengan segala kondisi geografisnya, maka masyarakat yang berdiam di pesisir dapat dikategorikan atas beberapa tipe, antara lain :

- a. Masyarakat Perairan, kesatuan-kesatuan sosial yang hidup dari sumber daya perairan (laut, sungai atau pantai), cenderung terasing dari kontak-kontak dengan masyarakat lain, lebih banyak berada di lingkungan perairan dari pada darat, dan berpindah-pindah tempat di suatu wilayah (teritorial) perairan tertentu.

- b. Masyarakat Nelayan, golongan masyarakat pesisir yang paling banyak memanfaatkan hasil laut dan potensi lingkungan perairan dan pesisir untuk kelangsungan hidup, umumnya telah bermukim secara tetap dan mudah memahami kontak dengan masyarakat lain. Hasil laut yang mereka peroleh tidak dikonsumsi sendiri, tetapi didistribusikan dengan imbal ekonomi kepada pihak lain serta kehidupan sosial budaya mereka lebih banyak di daratan.
- c. Masyarakat Pesisir Tradisional, masyarakat yang berdiam dekat perairan laut tetapi sedikit sekali menggantungkan kelangsungan hidupnya dari sumber daya laut mengutamakan kegiatan subsistensi di daratan, lebih menguasai pengetahuan mengenai lingkungan darat.

E. Karakteristik Masyarakat Pesisir/Nelayan

Sebelum membicarakan mengenai masyarakat pesisir khususnya nelayan, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai konsep masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja dalam jangka waktu cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan sadar, bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas (Mattulada, 1997). Sedangkan Soekanto (2002) merinci unsur-unsur masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur dalam waktu yang lama, sadar sebagai suatu kesatuan dan sadar sebagai suatu sistem hidup bersama.

Selanjutnya Mattulada (1997) mengemukakan masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia hidup bekerjasama di suatu daerah tertentu yang disebut pantai. Sementara itu orang yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan mempunyai mata pencaharian sebagai penangkap ikan dan hasil laut lainnya disebut sebagai nelayan.

Kota Parepare dengan panjang garis pantai 11,6 km di pesisir pantai Kota Parepare yang dijadikan oleh nelayan sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), memiliki nelayan sebanyak 913 orang yang tersebar di 3 kecamatan. Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan 9 jenis alat tangkap dan berjumlah 411 buah alat tangkap. Produksi perikanan laut menghasilkan 3.795,9 Ton, lebih dari 13 jenis ikan hasil tangkapan dengan Rumah Tangga Perikanan sebanyak 386 RTP. Sedangkan industri yang bergerak di sektor perikanan sebanyak 25 perusahaan. Dengan potensi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.

Satria (2002) membagi nelayan berdasarkan status penguasaan kapital, yaitu nelayan pemilik/punggawa dan nelayan buruh. Nelayan pemilik/punggawa yaitu orang yang memiliki sarana penangkapan, seperti kapal/perahu, jaring dan alat tangkap lainnya. Sedangkan nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan laut.

Mubyarto, dkk (1984) mengemukakan bahwa masyarakat nelayan ditinjau dari aspek ekonomi memiliki stratifikasi yaitu :

- a. Nelayan kaya yang mempunyai kapal dan mempekerjakan nelayan lain sebagai pandega, tanpa ia sendiri ikut bekerja;
- b. Nelayan kaya yang mempunyai kapal, tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal;
- c. Nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan dan mempunyai perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga;
- d. Nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya yang tidak mencukupi kebutuhan lainnya, sehingga harus ditambah dengan bekerja lain, untuk kebutuhannya beserta keluarganya;
- e. Nelayan pandega atau nelayan sawi yang tidak mempunyai perahu, sehingga kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan bekerja sebagai awak kapal.

Karakteristik utama dari masyarakat pesisir, antara lain:

- a. Sistem Pengetahuan, teknik penangkapan ikan pada umumnya didapat dari pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris;
- b. Sistem Kepercayaan, secara teologis nelayan masih mempercayai bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga perlu perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin;

- c. Peran Wanita, selaku isteri nelayan yang bergelut dalam urusan domestik rumah tangga juga menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dalam melakukan penangkapan ikan di perairan dangkal, pengolahan ikan maupun kegiatan jasa dan perdagangan;
- d. Posisi Sosial Nelayan, masih dianggap rendah disebabkan oleh keterasingan nelayan yang kurang kesempatannya dalam melakukan interaksi dengan masyarakat lain. Lebih banyak alokasi waktu nelayan, untuk melakukan penangkapan ikan di laut daripada sosialisasi dengan masyarakat lain secara geografis relatif jauh dari pantai.

F. Kerangka Pemikiran

Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kemiskinan di wilayah pesisir Kota Parepare, yakni pertambahan dan kepadatan penduduk, masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan tangkap kurang memanfaatkan potensi yang ada.

Kondisi letak Kota Parepare yang strategis dengan jalur lalu lintas darat Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat dan dapat menghubungkan antara kabupaten/kota yang berada Sulawesi Selatan serta jalur lalu lintas laut regional, nasional ke Tawao Malaysia. Hal tersebut didukung dengan keberadaan beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Cappa Ujung dan pelabuhan perahu tradisional. Keberadaan pelabuhan juga memberikan pengaruh terhadap

pertambahan penduduk yang senantiasa mengalami pertumbuhan setiap tahunnya namun dapat juga dimanfaatkan untuk pengembangan industri hasil produksi perikanan.

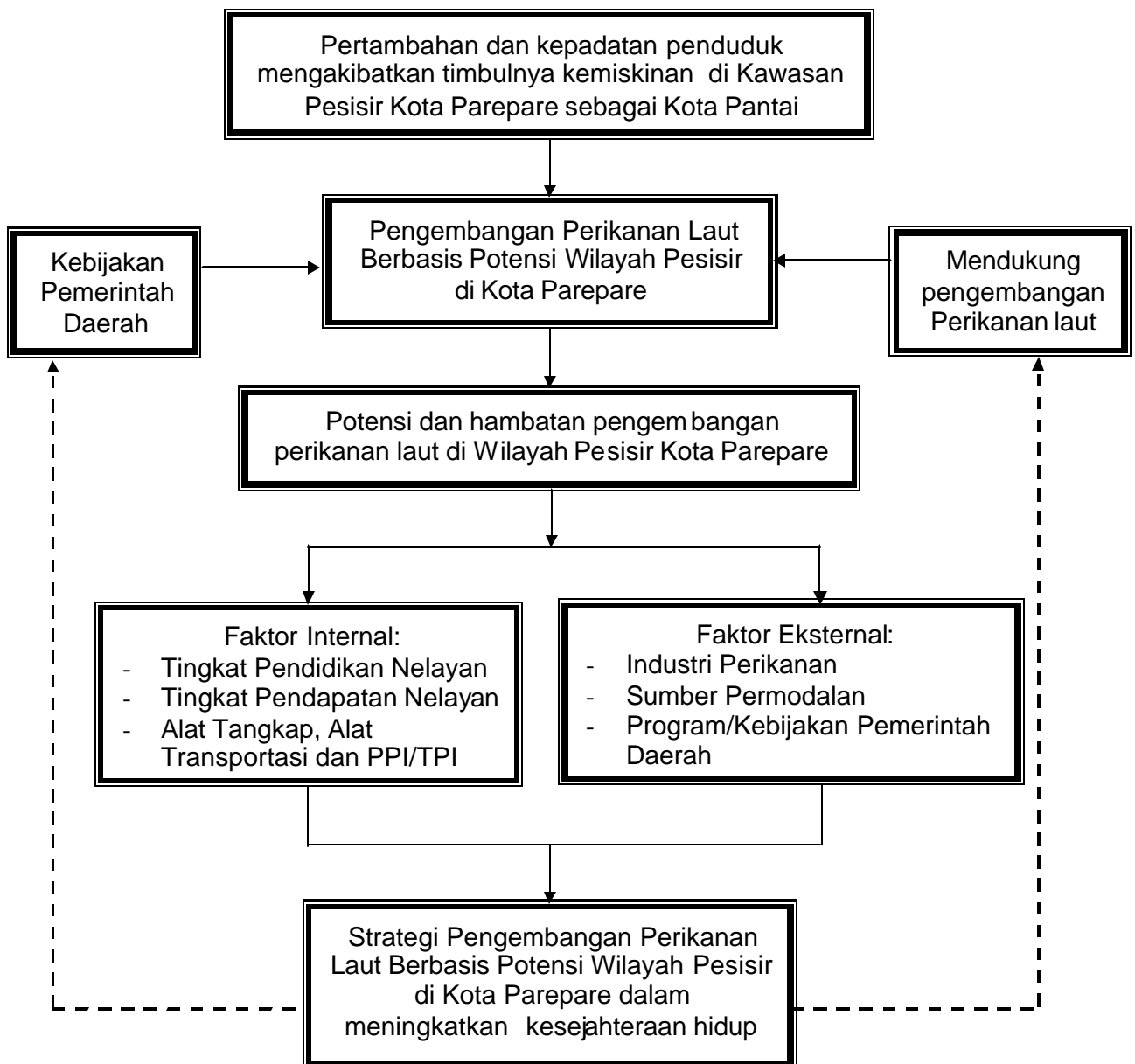
Kota Parepare sebagai kota pantai dengan pusat kota yang berada di pesisir pantai terus mengalami perkembangan. Pesisir sebagai pusat kota tempat berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan kepadatan terjadi baik berupa keragaman aktifitas maupun jumlah penduduk, sehingga kemiskinan khusus masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap.

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap dilakukan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh nelayan tangkap, dan dalam kerangka pikir ini diidentifikasi faktor internal antara lain tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, alat tangkap, alat transportasi dan TPI/PPI dan faktor eksternal antara lain industri perikanan, sumber permodalan dan program/kebijakan pemerintah daerah.

Setelah kedua faktor tersebut ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah mengoperasionalkan faktor-faktor tersebut dalam bentuk indikator-indikator yang ditabulasi dan persentase, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir dalam mendukung pengembangan perikanan laut melalui kebijakan pemerintah

daerah. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

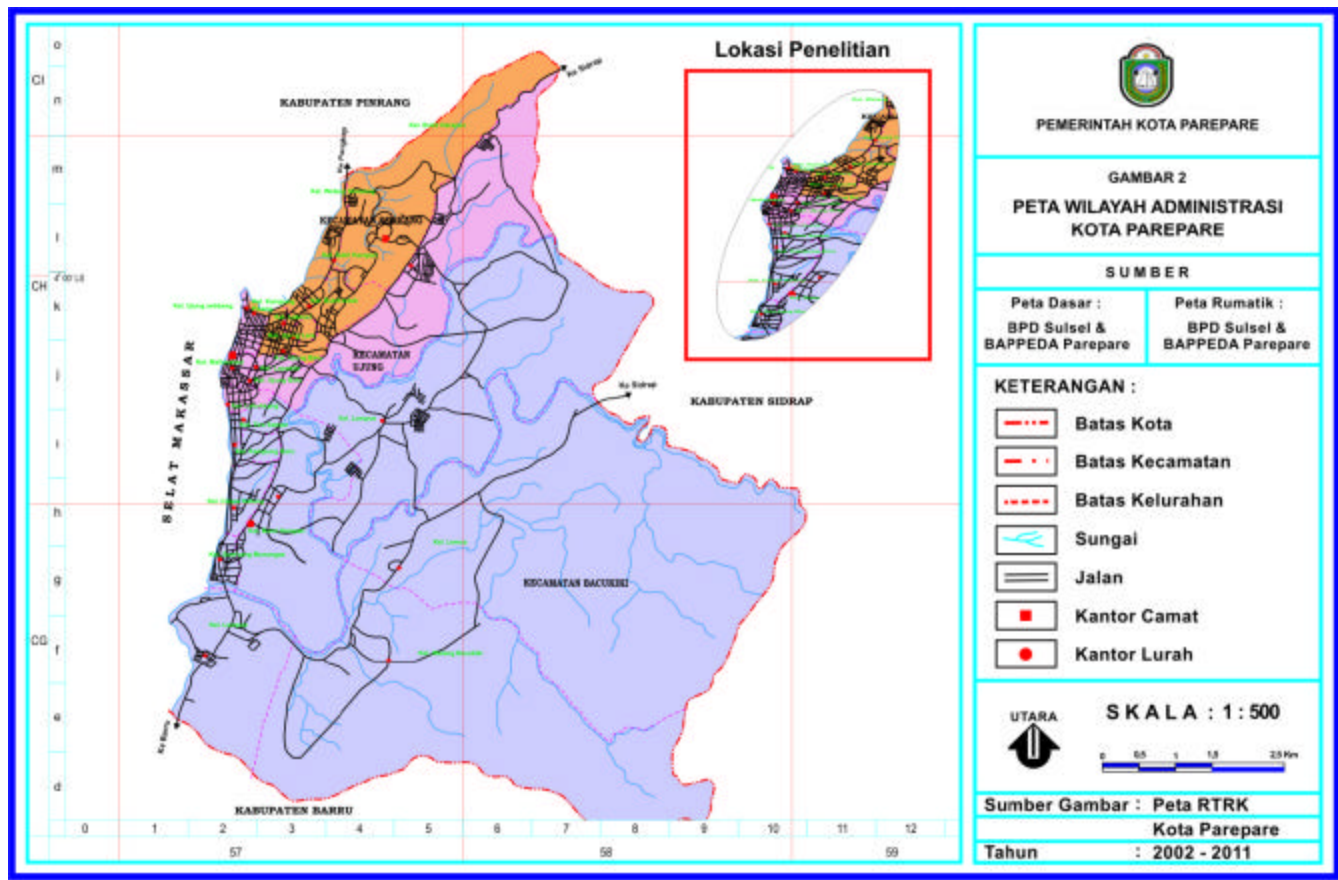
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare. Dasar penelitian yang digunakan adalah survey dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah informasi atau data berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian berkaitan dengan obyek penelitian, data dan informasi dari instansi terkait yang menangani masalah pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan, yaitu bulan September sampai dengan November 2006. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pantai Kota Parepare. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Parepare memiliki kawasan pesisir dan dapat dikategorikan sebagai kota pantai dengan potensi perikanan laut yang dimiliki dan dapat digali dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya.



Gambar 2. Peta Administrasi Kota Parepare dan Lokasi Penelitian
Sumber: Berdasarkan Peta RTRW Kota Parepare 2002 - 2011

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Arikunto (1998) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dari uraian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen masyarakat yang berada di Pesisir Pantai Kota Parepare, dalam hal ini masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Berdasarkan data dan informasi Bidang Perikanan dan Kelautan pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2005, masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap berjumlah 325 Rumah Tangga Perikanan Tangkap.

2. Sampel

Arikunto (1998) mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subyek penelitian kurang 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, sedangkan jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10–15%.

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap, dengan demikian diperoleh jumlah sampel sebanyak 50 Rumah Tangga Perikanan Tangkap yakni 15% dari populasi (325 RTP Tangkap). Berdasarkan jenis data yang

dibutuhkan dalam proses analisis maka teknis penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah teknik *Simple Random Sampling*, yaitu penarikan sampel secara acak dari populasi, dimana keseluruhan populasi memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel dengan kondisi sosial ekonomi cenderung sama.

Melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis juga melakukan wawancara dengan sejumlah instansi terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare, antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
2. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (Dinas PKPK)
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah (Dinas Perindag dan PMD)
4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Data Primer

Jenis data ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi/pengamatan langsung di lapangan,

penyebaran kuisisioner kepada masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan wawancara dengan instansi terkait dari pemerintah daerah.

2. Data Sekunder

Jenis data ini adalah data yang diperoleh dari instansi terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare dan dari bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, melalui pengamatan langsung di lapangan mengenai permasalahan yang dihadapi secara nyata.
- b. Kuisisioner, melalui penyebaran daftar isian pertanyaan kepada responden untuk diisi sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.
- c. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden menggunakan daftar pertanyaan.
- d. Dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen resmi dari berbagai sumber yang terkait baik dari lokasi

penelitian dan pemerintah berupa kajian literature, keputusan-keputusan serta sejumlah peraturan dan dokumen lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis data, teknik atau metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yaitu untuk menilai potensi wilayah pesisir dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut di Kota Parepare, maka dilakukan analisis dengan menggunakan tabulasi dan persentase terhadap variabel, antara lain:
 - a. Kesejahteraan masyarakat nelayan, dengan indikator tingkat pendidikan dan pendapatan.
 - b. Ketersediaan Sarana Penangkapan Ikan dengan indikator Alat Tangkap (Jenis, kapasitas dan jumlahnya), Alat Transportasi (kapal/perahu) dan PPI/TPI.
 - c. Usaha Perikanan dengan indikator Industri Perikanan dan Sumber permodalan.
2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare, maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT terhadap faktor internal dan

eksternal dalam pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir.

SWOT merupakan singkatan dari *Strength*, *Weakneses*, *Opportunities and Threat* Menurut Salusu (1996:350) metode SWOT digunakan untuk mencari alternatif stratejik guna mendapatkan titik temu antara faktor-faktor stratejik, baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2001). Untuk lebih jelasnya, metode SWOT dapat dilihat seperti Tabel 1.

Tabel 1. Matriks SWOT

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	VARIABEL KEKUATAN (STRENGTHS)	VARIABEL KELEMAHAN (WEAKNESSES)
Variabel Peluang (Opprtunities)	Strategi SO Pakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Tanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Variabel Ancaman (Threats)	Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT Memperkecil kelemahan untuk menghindari ancaman

Langkah-langkah menggunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor eksternal (FE) dan faktor internal (FI) yang terdiri dari peluang dan ancaman (FE) serta kekuatan dan kelemahan (FI)
2. Merumuskan faktor-faktor eksternal dan internal guna mendapatkan alternatif strategi

Langkah pertama dalam analisis ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare. Kemudian dianalisis faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan/kelemahan dan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang/ancaman, sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian ini maka analisis kekuatan/kelemahan dan analisis peluang/ancaman, sebagaimana tercantum berikut ini :

1. Analisis kekuatan/kelemahan, antara lain:
 - a. Tingkat Pendidikan
 - b. Tingkat Pendapatan
 - c. Alat tangkap
 - d. Alat Transportasi
 - e. TPI/PPI

2. Analisis peluang/ancaman, antara lain:
 - a. Industri Perikanan
 - b. Sumber Permodalan
 - c. Kebijakan Pemerintah Daerah

G. Definisi Operasional

Untuk lebih mengarahkan operasional dan pemaparan pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare, maka digunakan batasan-batasan penelitian yang dijabarkan dalam bentuk definisi operasional, sebagai berikut:

1. Perikanan Laut adalah Perikanan tangkap yang menjadi mata pencaharian nelayan yang bertempat tinggal di pesisir pantai Kota Parepare baik sebagai pekerjaan pokok maupun sampingan yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya diperoleh dengan mengakses hasil laut.
2. Potensi wilayah pesisir adalah fasilitas yang terdapat di dalam wilayah pesisir dan dipergunakan oleh nelayan tangkap untuk mengakses hasil laut seperti letak dan kondisi Kota Parepare, Sumber Daya Manusia dalam hal ini masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap dengan tingkat pendidikan dan pendapatannya, PPI/TPI, alat tangkap, perahu/kapal dan industri yang bergerak di sektor perikanan dengan modal usaha yang dibutuhkan.

3. Masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia hidup bekerjasama di suatu daerah tertentu yang di sebut pantai. Orang yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan mempunyai mata pencaharian sebagai penangkap ikan dan hasil laut lainnya disebut sebagai nelayan. Nelayan terbagi atas 2 jenis, yaitu nelayan tangkap (penangkap ikan dan hasil laut) dan nelayan budidaya (petambak) atau nelayan budidaya dengan menggunakan kolam. Dalam penelitian ini, masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap.
4. Tingkat pendidikan nelayan tangkap adalah pendidikan terakhir yang pernah diraih atau ijazah yang dimiliki responden dengan menggunakan standarisasi Program Pemerintah Wajib Belajar 9 tahun, dengan kategori:
 - a. Sangat Rendah, jika tidak tamat SD
 - b. Rendah, jika tamat SD
 - c. Sedang, jika tamat SMP
 - d. Tinggi, jika tamat SMA/SMK
 - e. Sangat Tinggi, jika tamat Akademi/PT
5. Pendapatan nelayan tangkap adalah besarnya pendapatan nelayan tangkap baik dari nelayan tangkap sebagai pekerjaan pokok ataupun sampingan dalam sebulan. Angka ini diukur berdasarkan Upah Minimum Propinsi, dengan kategori:

- a. Rendah, jika pendapatan < Rp. 550.000
 - b. Sedang, jika pendapatan antara Rp. 550.000– Rp. 750.000
 - c. Tinggi, jika pendapatan antara Rp. 750.000 – Rp. 1.000.000
 - d. Sangat Tinggi, jika pendapatan > Rp. 1.000.000
6. Umur adalah usia nelayan yang bekerja sebagai nelayan tangkap dengan menggunakan standarisasi usia >19 tahun merupakan usia produktif. Cara mengukurnya dengan memberi tanda silang (X) pada kuisioner, dengan kategori:
- a. < 19 Tahun
 - b. 20 - 30 Tahun
 - c. 31 – 41 Tahun
 - d. > 42 Tahun
7. Ketersediaan sarana alat tangkap adalah adanya alat tangkap yang digunakan oleh nelayan tangkap untuk menangkap ikan dengan kategori alat tangkap berdasarkan data Sub Bidang Perikanan dan Kelautan Kota Parepare mengenai jenis alat tangkap yang digunakan nelayan di Kota Parepare.
8. Ketersediaan sarana alat transportasi adalah adanya perahu/kapal yang digunakan nelayan tangkap untuk menangkap ikan. Berdasarkan jenis perahu sehingga dapat diketahui jangkauan perahu, dengan kategori:
- a. Perahu Tanpa Motor
 - b. Perahu Motor Tempel

- c. Perahu Mesin Dalam (5 - 20 GT)
 - d. Perahu Mesin Dalam (>20 GT)
9. Status kepemilikan sarana adalah status penggunaan sarana baik alat tangkap maupun perahu/kapal yang digunakan oleh nelayan tangkap dalam melakukan aktifitasnya. Cara mengetahuinya dengan memberi tanda silang (X) pada kuisioner status kepemilikan alat tangkap dan perahu/kapal, dengan kategori:
- a. Milik pribadi
 - b. Bukan milik pribadi
10. Pangkalan Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan (PPI/TPI) merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh nelayan tangkap dalam memasarkan hasil tangkapannya, dengan kategori:
- a. Sangat Tinggi, jika pemasaran hasil tangkapan melalui TPI/PPI
 - b. Tinggi, jika pemasaran hasil tangkapan melalui/langsung ke penjual
 - c. Cukup Tinggi, jika pemasaran hasil tangkapan melalui pengusaha/saudagar
 - d. Rendah, jika pemasaran hasil tangkapan melalui pasar tradisional
11. Industri perikanan adalah industri yang bergerak di sektor perikanan laut dengan modal usaha yang dibutuhkan.
12. Hambatan adalah sesuatu kendala yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut baik berupa hambatan dalam

memperoleh sarana alat tangkap dan perahu/kapal, maupun industri yang bergerak di sektor perikanan dengan modal usaha yang dibutuhkan sebagai fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

13. Strategi pengembangan perikanan laut, adalah suatu cara atau upaya dalam pengelolaan perikanan laut dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan sebagai optimalisasi peranan sektor perikanan laut bagi kepentingan masyarakat, daerah dan negara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Parepare

1. Letak Geografis dan Administratif

Kota Parepare merupakan salah satu dari 23 (20 kabupaten 3 kota) yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak sebelah barat bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan (\pm 155 km ke arah utara Kota Makassar) dan merupakan poros jalan trans Sulawesi dengan luas total \approx 0,16 % dari luas total wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Data Statistik Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2004/2005, luas wilayah Kota Parepare \pm 99,33 km². Secara administratif pemerintahan, wilayah Kota Parepare terbagi atas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang dengan 21 kelurahan. Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan yang terluas dengan luas \approx 79,90 km² atau sekitar 80,24% luas Kota Parepare. Adapun batas-batas administrasi Kota Parepare, antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara geografis Kota Parepare terletak di pesisir Selat Makassar dan terletak pada posisi antara 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" – 119°43'40" Bujur Timur (0°0'0" Jakarta = 160°48'28" BT Greenwich) sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0 meter sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Dengan posisi tersebut menjadikan Kota Parepare sebagai salah satu kota di Kawasan Timur Indonesia yang sangat strategis bagi lalu lintas perdagangan dan transportasi baik melalui laut maupun darat antar regional dengan Pulau Kalimantan, provinsi dan antar kabupaten/kota dalam wilayah Sulawesi.

2. Kondisi Topografi dan Penggunaan Lahan

Kota Parepare berada pada ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi topografi yang bervariasi dengan kemiringan antara 0° - 80°. Sebagian besar wilayah Parepare berada pada kelas lereng 2 – 15% ha sebanyak 34%, kemiringan lereng 15 – 40% sebanyak 22% dan di atas kemiringan lereng 40% sebanyak 32,17%.

Dengan kondisi iklim tropis basah pada umumnya mempunyai musim yang hampir sama di seluruh Indonesia, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu.

Cuaca Kota Parepare dengan temperatur rata-rata 28,5°C suhu minimum 25,7°C dan suhu maksimum 31,6°C. Curah hujan berkisar antara 0 -20 hari dengan kecepatan angin rata-rata 1,7 – 2,6 m/det. Berdasarkan pembagian tipe iklim menurut Oldemen, Kota Parepare termasuk iklim C2 dengan bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering antara 2 – 3 bulan. Sedangkan dalam penggunaan lahan terdiri dari hutan 39,17%, tegalan 22,88%, padang rumput 20,40%, sawah 10,00%, perumahan sebanyak 4,41%, jalan 1,42%, jasa 0,70%, perusahaan 0,59% dan yang terkecil industri 0,17%.

3. Kependudukan

Dari tinjauan morfologi atau berdasarkan batas administrasi pemerintahan Kota Parepare terbagi terbagi atas 3 kecamatan dan 21 kelurahan dengan jumlah penduduk awal tahun 2005 berjumlah 118.266 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.191 jiwa/km.

Adapun jumlah rumah tangga dan penduduk per kecamatan di Kota Parepare sebagaimana tercantum pada Tabel 2 dan Tabel 3 yang mencantumkan mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Parepare.

Tabel 2. Jumlah rumah tangga dan penduduk per kecamatan

KECAMATAN	RUMAH TANGGA	PENDUDUK		
		LK	PR	Jumlah
Kec. Bacukiki	9.526	22.228	23.186	45.414
Kec. Ujung	6.171	15.070	15.310	30.380
Kec. Soreang	8.451	21.115	21.357	42.472
Jumlah	24.148	58.413	59.853	118.266

Sumber: BPS, Kota Parepare dalam Angka, Tahun 2004/2005

Tabel 3 Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk kecamatan di Kota Parepare Tahun 2003 - 2005

NO	KECAMATAN	LUAS (km ²)	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km ²)
1	Bacukiki	79,70	45.414	570
2	Ujung	11,30	30.380	2.688
3	Soreang	8,33	41.472	4.979
	Jumlah	99,33	118.266	1.180

Sumber: BPS, Kota Parepare dalam Angka Tahun 2004/2005

4. PDRB Kota Parepare

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah tersebut. Kemajuan perekonomian suatu daerah

sangat tergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki baik SDA, SDM dan SDB daerah tersebut.

Berdasarkan data statistik Kota Parepare dalam angka Tahun 2004/2005 mengemukakan bahwa PDRB Kota Parepare atas dasar harga berlaku tahun 2004 sebesar 676.187,09 juta rupiah dengan kontribusi terbesar yang diberikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni sebesar 27.44% kemudian disusul oleh sektor angkutan dan komunikasi dengan sumbangan sebesar 24,39%, rata-rata pertumbuhan sebesar 6,23% dengan tingkat inflasi 7,21%, Sebagaimana tercantum pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. PDRB berdasarkan atas dasar harga berlaku (jutaan rupiah) dan distribusi persentase PDRB Kota Parepare 2003 - 2004

NO	SEKTOR	PDRB	%
1	Pertanian	55.585,14	8,18
2	Pertambangan & Galian	2.347,14	0,35
3	Industri Pengolahan	22.055,55	3,25
4	Listrik, Gas & Air Bersih	10.127,61	1,49
5	Bangunan	63.697,68	9,38
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	186.372,74	27,44
7	Angkutan dan Komunikasi	165.634,89	24,39
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	86.467,62	12,73
9	Jasa-jasa	86.898,71	12,79
Jumlah		676.187,09	100,00

Sumber : BPS, Kota Parepare dalam Angka Tahun 2004/2005

Keberhasilan PDRB di sektor perdagangan, hotel dan restoran ikut mendukung terwujudnya cita-cita dan harapan segenap masyarakat Parepare ke depan yang tertuang pada Visi Pemerintah Kota Parepare 2003 - 2008 yakni "Terwujudnya Parepare sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan menuju Kota Bandar Madani".

B. Keadaan Umum Pesisir Pantai Kota Parepare

Kondisi wilayah Kota Parepare sebagai kota pantai dengan pusat kota yang berada di wilayah pesisir, meliputi: kondisi georafis, kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemanfaatan ruang dan kondisi lainnya yang berkaitan dengan wilayah pesisir Kota Parepare.

1. Kondisi Geografis Wilayah Pesisir

Panjang pesisir Parepare 34 km, dimulai dari wilayah pesisir Kota Parepare yang berbatasan dengan Kabupaten Barru, sampai dengan Wilayah Pesisir Ujung Lero Kecamatan Suppa. Luas Teluk Parepare berdasarkan Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Parepare yaitu 2.778 ha (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1999).

Perairan Teluk Parepare menghadap ke arah Selatan, sehingga dinamika perairan sangat terpengaruh selain oleh gaya-gaya meteorologis berupa hembusan angin dari arah Barat Daya, juga oleh gaya-gaya astronomis berupa dinamika pasang surut. Pasang surut berada pada

kisaran rata-rata sebesar 81 cm, tinggi gelombang rata-rata < 1 meter, kecepatan arus berada pada kisaran 4 – 14,99 cm/detik. Kedalaman air laut berada pada kisaran 0 – 75 meter dbl, bagian Utara yang dangkal dengan kedalaman < 20 meter pada posisi tengahnya, dan bagian Selatan dengan kedalaman > 20 meter pada posisi tengahnya.

Penutupan lahan untuk wilayah pesisir Kota Parepare terdapat 7 jenis penutupan lahan dominan, yaitu pemukiman, tambak, kebun campuran, sawah, mangrove, hutan dan terumbu karang. Terdapat lokasi estuaria yang merupakan pertemuan aliran Sungai Karajae dengan pantai, yang memiliki potensi terjadinya sedimentasi/pendangkalan dan delta pada wilayah pesisir dan muara.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Wilayah pesisir Kota Parepare merupakan wilayah pusat perkotaan. Kota Parepare memiliki 3 kecamatan dengan 21 kelurahan, namun wilayah kecamatan tersebut tidak semuanya berada pada wilayah pesisir, sedangkan kelurahan yang berada di wilayah pesisir terdapat 11 kelurahan dengan penduduk berjumlah 56.897 jiwa dengan 11.689 Rumah Tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah rumah tangga dan penduduk per kecamatan dan kelurahan di wilayah pesisir Kota Parepare

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA	PENDUDUK		
			LK	PR	Jumlah
1	Kec. Bacukiki	6.226	14.302	15.049	29.351
	1. Lumpue	1.493	3.304	3.588	6.892
	2. Sump. Minangae	1.056	2.666	2.767	5.433
	3. Cappa Galung	1.522	3.287	3.458	6.745
	4. Tiro Sompe	1.120	2.619	2.730	5.349
	5. Kampung Baru	1.035	2.426	2.506	4.932
2	Kec. Ujung	2.811	6.782	6.994	13.776
	1. Labukkang	1.469	3.499	3.706	7.205
	2. Mallusetasi	566	1.305	1.266	2.571
	3. Ujung Sabbang	776	1.978	2.022	4.000
3	Kec. Soreang	2.652	6.787	6.983	13.770
	1. Kampung Pisang	811	2.016	2.089	4.105
	2. Lakessi	742	1.907	1.968	3.875
	3. Watang soreang	1.099	2.864	2.926	5.790
	Jumlah	11.689	27.871	29.026	56.897

Sumber: BPS, Kota Parepare dalam Angka, Tahun 2004/2005

Masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir ada yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan baik nelayan tangkap ataupun nelayan budidaya. Masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan berjumlah 913 jiwa. Sedangkan Rumah Tangga Perikanan (RTP) di Kota Parepare berjumlah 386, dengan rincian 325 RTP untuk perikanan tangkap/laut dan 61 RTP untuk perikanan darat, yang tersebar di 3 kecamatan (Data dan Informasi Perikanan Bidang Perikanan dan

Kelautan pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare, 2005).

Luas areal budidaya tambak di Kota Parepare adalah 71,80 km², jumlah bagan tancap yang ditempatkan tersebar di Teluk Parepare sebanyak ? 200 buah. Bagan tancap tersebut lebih banyak beroperasi di sekitar bagian dalam Teluk Parepare. Berdasarkan data dan informasi bidang perikanan dan kelautan Dinas PKPK Kota Parepare, nelayan Kota Parepare yang menggunakan bagan perahu 19 orang nelayan dan bagan tancap sebanyak 28 orang nelayan.

3. Kondisi Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang pesisir Parepare, meliputi jasa dan pemanfaatan lainnya yang terdiri dari kegiatan administrasi kepelabuhanan (Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Lontangnge, Pelabuhan Khusus PT. Pertamina).

Untuk pemanfaatan ruang pesisir lainnya, untuk kondisi saat ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Usaha budidaya tambak di Kelurahan Watang Bacukiki terdapat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Karajae, dan sekitar Kelurahan Watang Soreang.
- b. Kegiatan kehutanan, pertanian dan perkebunan di Kelurahan Lompoe dan Lemoe di sepanjang Sungai Karajae.

- c. Aktifitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), di Kelurahan Sumpang Minangae, Labukkang, Lakessi, Cempae.
- d. Kegiatan konservasi atau penanaman dan pemeliharaan pohon bakau (mangrove) di sepanjang Sungai Karajae, Kelurahan Watang Soreang dan di dekat perbatasan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang.
- e. Aktifitas perniagaan Pasar Lakessi, Pasar Labukkang, Pasar Sumpang Minangae dan Pasar Senggol yang berhubungan langsung dengan pesisir pantai.
- f. Obyek wisata permandian alam Lumpue.
- g. Aktifitas di jalur pelayaran yang berada di Teluk Parepare.
- h. Permukiman dan perkantoran.
- i. Aktifitas galangan kapal dan Industri pembuatan kapal rakyat di Kelurahan Kampung Pisang dan Kelurahan Ujung Sabbang.
- j. Industri repair motor listrik dan industri repair mesin kapal.
- k. Industri pengeringan dan penggaraman ikan.

C. Potensi Perikanan Laut Kota Parepare

Kota Parepare secara geografis terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi dengan teluk di sebelah barat dan perbukitan di sebelah timur serta pusat kota yang berada di pesisir. Kota Parepare dengan jalur transportasi darat yang dapat menghubungkan antara kabupaten/kota

dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat serta transportasi laut yang dapat menghubungkan dengan pulau Kalimantan.

Kota Parepare sebagai kota pantai dengan posisi berada di pesisir Selat Makassar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup potensial khususnya di sektor perikanan yang dapat ditumbuh kembangkan. Perikanan terbagi atas 2 jenis, yakni perikanan tangkap atau perikanan laut dan perikanan budidaya atau perikanan darat berupa budidaya tambak dan budidaya kolam.

1. Potensi Keberadaan LAPAN sebagai Instalasi Penginderaan Jarak Jauh Sumber Daya Alam

Potensi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berada di Teluk Parepare yakni potensi keberadaan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai instalasi penginderaan jarak jauh sumber daya alam. Keberadaan LAPAN dengan teknologi Penginderaan Jarak Jauh yang dapat mendeteksi keberadaan ikan. Penggunaan citra satelit bagi nelayan tangkap di Kota Parepare telah diterapkan selama 4 tahun dan untuk pengenalan dalam menggunakan Citra satelit oleh LAPAN dilakukan dengan cara melakukan pelatihan kepada nelayan tangkap sebanyak 5 orang dari tiap-tiap daerah dengan peserta yang berasal dari kabupaten/kota yang berada di pesisir dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Parepare mengemukakan bahwa penggunaan teknologi (citra satelit) 99,9% nelayan telah mengetahui lokasi keberadaan ikan sehingga langsung melakukan penangkapan ikan tanpa harus melakukan terlebih dahulu pencarian ikan, namun teknologi tersebut belum dapat dipergunakan secara maksimal disebabkan oleh keterbatasan alat berupa GPS yang secara langsung berhubungan dengan nelayan yang berada di lokasi penangkapan ikan, sebagian nelayan menggunakan peta laut tetapi keterbatasan jangkauan perahu yang dipergunakan nelayan tangkap mengakibatkan keterlambatan nelayan tiba di lokasi penangkapan sehingga ikan telah bergerak berpindah tempat. Nelayan tangkap dengan keterbatasannya hanya dapat menunggu ikan sampai pada posisi yang terdekat dan dapat dijangkau dengan perahu yang digunakan oleh nelayan.

Untuk mengetahui lokasi keberadaan ikan, LAPAN dengan penginderaan jarak jauh dapat mengetahui, namun hal tersebut masih terkendala dengan pengolahan data yang seluruhnya belum dapat diolah oleh LAPAN Kota Parepare sehingga data yang dimiliki LAPAN Kota Parepare di kirim ke Jakarta, hasil olah data dari Jakarta dikirim dengan menggunakan facsimile yang berada di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cabang Kota Parepare teknologi tersebut hanya dapat digunakan oleh nelayan dengan skala besar/punggawa sedangkan nelayan tangkap dengan alat transportasi dan alat tangkap yang masih

bersifat tradisional belum dapat menggunakan teknologi tersebut terkendala pada sarana yang digunakan. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan nelayan tangkap yang masih rendah sehingga nelayan tangkap terhambat pada penguasaan teknologi, untuk itu sangat dibutuhkan adanya peningkatan sumber daya manusia khususnya masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap.

2. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan Kota Parepare, baik perikanan laut maupun perikanan darat yang dapat memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang diperoleh dari produksi baik nelayan tangkap ataupun nelayan budidaya. Produksi perikanan nelayan yang difasilitasi oleh pengusaha yang berasal dari luar daerah seperti pengadaan alat tangkap ataupun perahu yang digunakan sehingga hasil produksi dapat dipasarkan ke beberapa daerah yang berada di sekitar Kota Parepare. Secara tidak langsung produksi perikanan telah dipasarkan ke daerah lain turut berperan dalam pengembangan wilayah dalam sektor perikanan. Untuk lebih jelasnya, hasil produksi perikanan Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan produksi perikanan Kota Parepare Tahun 2003 - 2005

NO	JENIS PERIKANAN	TAHUN (TON)		
		2003	2004	2005
1	Perikanan Laut			
	1. Tuna	3,2	3,9	1,4
	2. Cakalang	1.061	1.135	952,1
	3. Tongkol	144	145,7	120
	4. Kakap	42	42,7	21,7
	5. Kembung	315	319,8	165,8
	6. Tenggiri	1	1,2	0,9
	7. Layang	1.027,7	1.132,6	1.008
	8. Selar	478,3	478,6	268,7
	9. Belanak	11	18	164
	10. Ikan Terbang	157	159,3	62,1
	11. Tembang	312,2	391,9	164,8
	12. Teri	534,3	567,7	552,9
	13. Lajur	2,1	2,2	2
	14. Ikan Lainnya	818,9	656,7	464,1
	Jumlah	4.907,9	5.055,3	3.795,9
2	Perikanan Darat			
	1. Ikan Bandeng	12,5	-	1,3
	2. Udang	77	47,5	26,8
	Jumlah	89,5	47,5	28,1

Sumber: Data & Informasi Bid. Perikanan & Kelautan, Tahun 2005

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa hasil produksi perikanan Kota Parepare mengalami penurunan yang drastis. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal yakni adanya fenomena dan

bencana alam yakni tsunami, adanya kenaikan dan kelangkaan bahan bakau minyak, serta kendala dan keterbatasan nelayan tangkap yang akan dibahas lebih lanjut.

Untuk pengembangan peningkatan usaha perikanan dan meningkatkan kembali hasil produksi perikanan, maka pemerintah merencanakan program sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Parepare tahun 2006 – 2008 antara lain pengkajian lokasi dan pengembangan budidaya teripang, penataan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, pembinaan pasca panen perikanan, pembinaan usaha penangkapan ikan.

3. Industri Perikanan

Hasil produksi perikanan laut tersebut khususnya hasil tangkapan nelayan di Kota Parepare dapat langsung dijual ataupun diolah menjadi abon ikan, dan ada pula yang melalui proses pengeringan ikan yakni ikan kering dan ikan asin. Hasil olah tersebut dapat dipasarkan ke daerah lain yang berada di sekitar wilayah Kota Parepare dengan didukung oleh jalur transportasi yang lancar serta mudah dijangkau seperti ke Pusat Provinsi yakni Kota Makassar dan Provinsi tetangga yakni Pulau Kalimantan.

Hasil olahan tersebut, dikelola oleh industri rumah tangga yang dominan bertempat tinggal di pesisir pantai. Berdasarkan hasil observasi lapangan, salah satu industri rumah tangga tersebut yakni pengeringan

ikan dilakukan masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai atau di lokasi reklamasi pantai yang dikerjakan oleh anggota keluarga nelayan.

Untuk mendukung hasil produksi perikanan, terdapat juga industri yang bergerak di sektor perikanan seperti reparasi mesin kapal, industri galangan kapal, dan lain-lain. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah (Perindag dan PMD) Kota Parepare terdapat 32 industri yang bergerak pada sektor perikanan dengan 6 jenis usaha antara lain pengeringan ikan, abon ikan, industri es balok, pemeliharaan mesin kapal, industri galangan kapal dan reparasi mesin kapal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 8 tentang Industri Perikanan Kota Parepare

Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2006 antara lain program peningkatan/pengembangan perkoperasian dan perdagangan dengan kegiatan bimbingan teknis dan pengemasan (packaging), labeling serta manajemen pemasaran bagi industri ruman tangga (abon ikan, sulaman bordir, kerajinan) dan kegiatan bimbingan teknologi proses pengolahan ikan presto.

4. Sumber Permodalan

Keberadaan perbankan mendukung visi serta perkembangan perekonomian Kota Parepare sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan dan sebagai kota transit dengan jalur darat maupun laut. Adapun perbankan yang terdapat di Kota Parepare sebanyak 8 bank, baik bank pemerintah maupun swasta yakni BPD, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Danamon BTPN dan Bukopin.

Keberadaan Perbankan baik bank pemerintah maupun swasta di Kota Parepare belum adanya Bank yang memberikan kredit usaha tanpa agunan bagi nelayan baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Ketua HNSI Cab. Kota Parepare sehingga nelayan kesulitan dalam mengembangkan usahanya untuk pengadaan sarana alat tangkap maupun perahu yang digunakan menangkap ikan.

Untuk mendukung perekonomian masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap, maka Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada tahun 2005 - 2007 dapat diperoleh nelayan tangkap Kota Parepare. Program PEMP ini terdiri atas 3 kegiatan, antara lain:

1. Kredit Usaha Nelayan yang dikelola oleh KSU. Swa Mitra Bahari, dana bantuan sebesar Rp. 535.000.000,- dengan ketentuan bunga

kredit sebesar 1% dan tanpa agunan, kredit tersebut diperuntukkan bagi kelompok nelayan dan kelompok nelayan tersebut memperoleh kredit sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-.

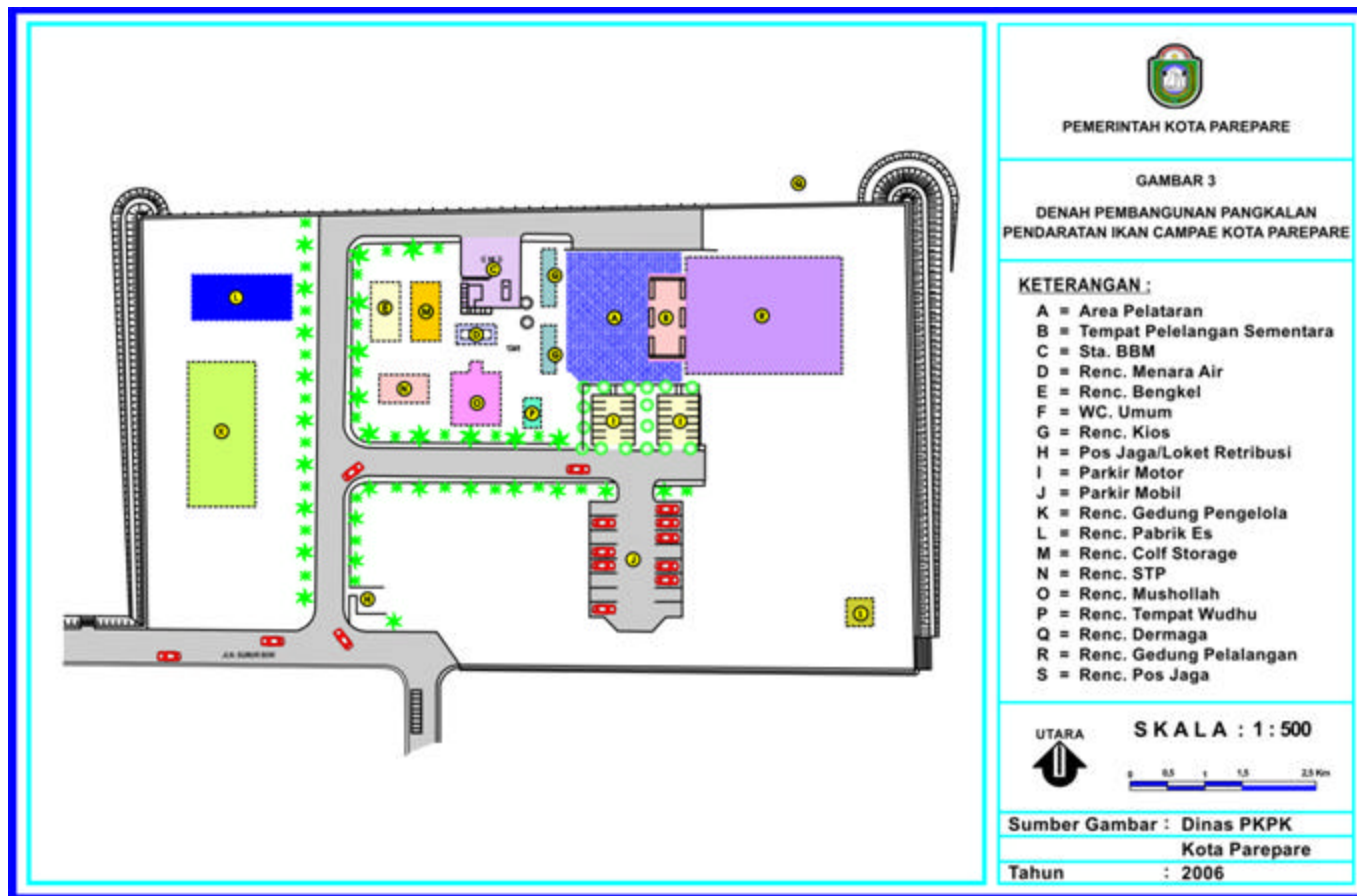
2. Kedai Pesisir merupakan koperasi yang menyediakan kebutuhan nelayan dan alat-alat tangkap nelayan yang dikelola oleh Surya Sejahtera Muhammadiyah dengan dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,-
3. Solar Pocket Dealer Nelayan (SPDN) yang dikelola oleh KSU. Bina Masyarakat Nelayan dengan dana bantuan sebesar Rp. 250.000.000,-

Pelaksanaan program PMEP dilakukan secara bertahap yakni tahun 2005 pelaksanaan kegiatan Kredit Usaha Nelayan dan Kedai Pesisir sedangkan Tahun 2006 – 2007 pelaksanaan kegiatan Solar Pocket Dealer Nelayan berupa peralatan mesin bahan bakar solar bagi nelayan, bangunan tempat penyimpanan mesin solar merupakan pengadaan pada program Pembangunan PPI Cempae dan pasokan bahan bakar solar kerjasama dengan Depot Pertamina Wilayah Parepare sehingga kegiatan SPDN/SPBN tersebut merupakan perpaduan dan kerjasama antara dengan program PEMP, program Pembangunan PPI Cempae dan Depot Pertamina Wilayah Parepare.

5. Kebijakan Pemerintah

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan salah satu kebijakan pemerintah pada pembangunan daerah, program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap dan diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan nelayan tangkap dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan seperti tempat membongkar muat hasil tangkapan, tempat bertambatnya kapal atau perahu penangkap ikan, pelelangan ikan dan lain-lain. Untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan nelayan tangkap tersebut, maka Pemerintah Kota Parepare membangun Pangkalan Pendaratan Ikan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar seperti Tempat Pelelangan Ikan, Pabrik Es, Cold Storage, Tempat Pengisian BBM dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 mengenai Denah Pembangunan PPI Cempae Kota Parepare.

Lokasi Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan berada di RW. Cempae Menara Kelurahan Watang Soreang/Cempae Kecamatan Soreang. Lokasi terletak di pesisir bagian Barat Teluk Parepare dengan jarak lokasi dari Kota Parepare \pm 1 Km. Lokasi dapat diakses melalui jalur poros Parepare dengan Kabupaten Pinrang dengan angkutan umum, sehingga lokasi dapat dicapai dengan mudah.



Gambar 3. Denah Pembangunan PPI Cempae Kota Parepare
 Sumber: Dinas PKPK Kota Parepare 2006

Pembangunan PPI dilakukan diatas lahan hasil reklamasi pantai seluas \pm 1,5 Ha dengan sumber dana yang berasal Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 17.100.000.000,- serta dana pendamping sebesar 10% dari DAK atau Rp. 1.900.000.000,- sehingga total dana yang dibutuhkan untuk Pembangunan PPI Cempae sebesar Rp.19.000.000.000,-.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan PPI tersebut dilakukan secara bertahap, yakni sebanyak 3 tahap pelaksanaan dari tahun 2005 sampai dengan 2007. Tahap pertama dilakukan pada Tahun 2005 dengan kegiatan penimbunan dan pemasangan talud fender. Tahap kedua dilaksanakan pada Tahun 2006 dengan kegiatan penimbunan, pemasangan talud fender dan pembuatan bangunan yang berada di PPI Cempae, antara lain:

1. Tempat Pelelangan Ikan
2. Stasiun BBM, untuk pengisian BBM Solar dapat melayani nelayan sebanyak 57 kapal sesuai dengan daftar nama kapal nelayan dan kebutuhan BBM (solar) sebagaimana terlampir pada lampiran 9 serta dapat memfasilitasi nelayan tradisional yang beroperasi di pesisir Kota Parepare.
3. WC Umum
4. Pos Jaga/Loket Retribusi
5. Jalan, Parkir dan Pelataran

6. Pekerjaan Timbunan Batu, Tanggul, Talud Fender dan Gorong-gorong.

Tahap ketiga dilaksanakan pada Tahun 2007 dengan kegiatan pembuatan bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat cold storage. Alat cold storage merupakan pengadaan tahun 2005 yang sebelum di gunakan sementara di Pasar Lakessi akan tetapi alat tersebut belum mempunyai bangunan untuk tempat penyimpanan alat tersebut. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat tersebut akan dibangun di dalam lokasi PPI Cempae dan beserta dengan alat tersebut akan dipindahkan ke dalam lokasi PPI Cempae.

D. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap yang berada di pesisir pantai Kota Parepare yang berjumlah 50 RTP Tangkap dari 325 RTP Tangkap atau 15% dari populasi yang dipilih secara *Simple Random Sampling*.

Karakteristik responden berdasarkan usia yang dihasilkan dari penelitian lapangan sebagaimana tercantum pada Tabel 7 di bawah ini, menunjukkan bahwa responden dengan usia >42 tahun merupakan kelompok usia responden tertinggi sebanyak 28 orang atau 56% dan kelompok usia responden 20 – 30 tahun terendah sebanyak 7 orang atau

14%, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap banyak ditekuni oleh responden dengan usia 19 – 40 keatas, dan usia tersebut juga termasuk dalam kelompok usia produktif.

Tabel 7. Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin

NO	USIA	PRIA	WANITA	JUMLAH	PERSENT. %
1	< 19 Tahun	-	-	-	-
2	20 – 30 tahun	7	-	7	14,00
3	31 – 41 Tahun	15	-	15	30,00
4	> 42 tahun	26	2	28	56,00
	Jumlah	50	2	50	100,00

Ditinjau dari jenis kelamin responden sebagaimana tertera pada Tabel 7 menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki mendominasi untuk menekuni pekerjaan sebagai nelayan tangkap daripada responden dengan jenis kelamin perempuan. Sesuai dengan hasil kuisisioner jenis kelamin laki-laki sebanyak 48 orang atau 96% sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang atau 4% masyarakat pesisir yang menekuni mata pencaharian sebagai nelayan tangkap.

Pekerjaan sebagai nelayan tangkap membutuhkan kekuatan fisik atau tenaga yang kuat untuk menekuni pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan sebagai nelayan tangkap dominan dikerjakan oleh responden berjenis kelamin laki-laki dibandingkan responden berjenis kelamin

perempuan. Responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang memiliki pekerjaan pokok sebagai pegawai negeri dan pekerjaan sampingan yang ditekuni sebagai nelayan tangkap merupakan pekerjaan sampingan. Untuk menekuni pekerjaan sebagai nelayan tangkap menggunakan alat tangkap berupa bagan tancap dan untuk pengelolaannya dibantu oleh beberapa tenaga kerja.

Status pekerjaan sebagai nelayan tangkap dikategorikan sebagai pekerjaan pokok atau utama sedangkan status pekerjaan sebagai nelayan tangkap dikategorikan sebagai pekerjaan sampingan dan pekerjaan pokoknya sebagai PNS, karyawan dan buruh. Pekerjaan sebagai nelayan tangkap baik sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan yang senantiasa ditekuni oleh masyarakat pesisir didukung oleh lokasi tempat tinggal responden berada di pesisir pantai.

Tabel 8. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

NO	PEKERJAAN	N	PERSENT. %
1	Nelayan	46	92,00
2	PNS	2	4,00
3	Karyawan	1	2,00
4	Buruh	1	2,00
Jumlah		50	100,00

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 8 menunjukkan bahwa status pekerjaan responden dengan pekerjaan pokok yakni sebagai nelayan tangkap sebanyak 46 orang atau 92%, sedangkan nelayan tangkap sebagai pekerjaan sampingan dengan pekerjaan pokok sebagai PNS sebanyak 2 orang atau 4%, Karyawan sebanyak 1 orang atau 2% dan buruh sebanyak 1 orang atau 2%.

Jumlah anggota keluarga menjadi tanggungan responden, baik keluarga inti maupun keluarga yang menumpang. Jumlah anggota keluarga nelayan yang menjadi tanggungan dibagi atas beberapa kategori yakni jumlah anggota keluarga 1 – 3 orang dikategorikan sebagai tanggungan sedikit, 4 – 6 orang dikategori tanggungan sedang, 7 – 9 dikategori tanggungan banyak dan > 10 orang dikategori tanggungan banyak sekali.

Tabel 9. Jumlah anggota keluarga responden

NO	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	N	PERSENT. %
1	1 – 3 Orang	11	22,00
2	4 – 6 Orang	30	60,00
3	7 – 9 Orang	7	14,00
4	> 10 Orang	2	4,00
Jumlah		50	100,00

Berdasarkan perolehan data primer menunjukkan bahwa 4 – 6 orang sebanyak 30 orang atau 60% dengan kategori tanggungan sedang

yang mendominasi banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungan nelayan tangkap, 1 – 3 orang sebanyak 22% dikategorikan sebagai tanggungan sedikit, 7 – 9 orang sebanyak 7% dikategorikan sebagai tanggungan banyak dan > 10 orang sebanyak 4% dikategorikan sebagai tanggungan terbanyak (banyak sekali). Dengan adanya anggota keluarga tersebut, diharapkan dapat membantu perekonomian nelayan tangkap, namun hal tersebut tidak banyak memberikan perubahan dalam perekonomian rumah tangga nelayan tangkap.

Sesuai dengan hasil olah data primer yang diperoleh menunjukkan bahwa keikutsertaan anggota keluarga responden dalam mencari sebanyak 15 orang atau 30% sedangkan anggota keluarga responden yang tidak ikut serta mencari nafkah sebanyak 35 orang atau 70%. Ketidak ikutsertaan keluarga nelayan tangkap dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari disebabkan juga oleh keterbatasan alat tangkap dan alat transportasi yang dimiliki, rata-rata alat tangkap yang dimiliki nelayan hanya 1 jenis serta perahu yang dimiliki juga hanya 1 buah.

Anggota keluarga nelayan tangkap yang ikut membantu mencari nafkah dilakukan oleh sang anak dengan cara ikut melakukan aktifitas melaut selain menjadi pelaut anak nelayan tangkap ada juga yang bekerja sebagai sopir angkutan, buruh pelabuhan dan tukang batu sedangkan isteri nelayan tangkap juga berusaha membantu perekonomian rumah tangganya dengan melakukan pekerjaan wiraswasta baik di sektor

perikanan baik berupa melakukan pengerikan ikan dan membuat abon ikan (industri rumah tangga) maupun di sektor lain seperti berdagang.

E. Pendidikan Nelayan Tangkap

Pendidikan turut berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan khususnya di sektor perikanan. Pengembangan di sektor perikanan dilakukan melalui penyuluhan serta penggunaan teknologi. Dengan pengetahuan dan pendidikan formal maupun yang dimiliki oleh nelayan tangkap dapat dengan mudah menyerap, menerapkan dan berkreasi melalui pendidikan non formal dengan atau tidak menggunakan teknologi yang dianjurkan oleh instansi terkait.

Tingkat pendidikan nelayan tangkap diukur berdasarkan pendidikan terakhir yang pernah diraih atau ijazah yang dimiliki oleh responden. Dengan menggunakan kategori tersebut, dapat dikemukakan bahwa kelompok tidak tamat SD dikategorikan dengan tingkat pendidikan sangat rendah, kelompok SD (tamat SD) dikategorikan dengan tingkat pendidikan rendah, kelompok SMP (tamat SMP) dikategorikan dengan tingkat pendidikan sedang, kelompok SMA/SMK (tamat SMA/SMK) dikategorikan dengan tingkat pendidikan tinggi dan kelompok Akademi/Perguruan Tinggi dikategorikan dengan tingkat pendidikan cukup tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden umumnya memiliki pendidikan yang tergolong rendah. Dari data yang ada, responden yang tidak tamat SD berjumlah 14 orang atau 28%, SD berjumlah 19 orang atau 38%, SMP berjumlah 6 orang atau 12%, SMA/SMK berjumlah 10 orang atau 20% dan Akademi/Perguruan Tinggi berjumlah 1 orang atau 2%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	N	PERSENT. %
1	Tidak Tamat SD	14	28,00
2	SD	19	38,00
3	SMP	6	12,00
4	SMA / SMK	10	20,00
5	Akademi / Perguruan Tinggi	1	2,00
Jumlah		50	100,00

Rendahnya tingkat pendidikan nelayan tangkap disebabkan dengan kehidupan mereka lebih banyak di laut dibandingkan dengan di darat, sehingga keturunannya lebih cenderung untuk mengikuti pendahulunya dengan bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Selain hal tersebut, yang menjadi pertimbangan meraih pendidikan yang lebih baik tersandung pada besarnya biaya pendidikan yang dibutuhkan tiap bulannya.

Biaya pendidikan diukur berdasarkan besar biaya yang dikeluarkan tiap bulanya. Berdasarkan indikator tersebut, maka kelompok tidak memiliki tanggungan dikategorikan biaya pendidikan sangat rendah, kelompok < Rp.300.000,- dikategorikan biaya pendidikan rendah, kelompok Rp.300.000,- – Rp.500.000,- dikategorikan biaya pendidikan sedang, kelompok Rp.500.000,- – Rp.700.000,- dikategorikan biaya pendidikan tinggi dan kelompok > Rp.700.000,- dikategorikan biaya pendidikan sangat tinggi.

Tabel 11. Besar biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh responden

NO	BIAYA PENDIDIKAN / BULAN	N	PERSENT. %
1	Tidak memiliki tanggungan	5	10,00
2	< Rp. 300.000	16	32,00
3	Rp. 300.000 – Rp. 500.000	21	42,00
4	Rp. 500.000 – Rp. 700.000	4	8,00
5	> Rp. 700.000	4	8,00
Jumlah		50	100,00

Dari data diperoleh sebagaimana tercantum pada Tabel 11 responden yang tidak memiliki tanggungan yang membutuhkan biaya pendidikan sebanyak 5 orang atau 10%, <Rp.300.000,- sebanyak 16 orang atau 32%, Rp.300.000,- – Rp.500.000,- sebanyak 21 orang atau 42%, Rp.500.000,- – Rp.700.000,- sebanyak 4 orang atau 8% dan >Rp.700.000,- sebanyak 4 orang atau 8%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa besar biaya pendidikan yang dibutuhkan responden

untuk membiayai pendidikan penerusnya pada umumnya termasuk kategori sedang. Namun, hal tersebut belum sebanding dengan besar pendapatan yang diperoleh tiap bulannya.

Pendidikan non formal juga dapat memberi pengaruh terhadap keberhasilan nelayan tangkap dalam menekuni pekerjaan. Pendidikan non formal yang dimaksudkan dalam hal ini seperti keikutsertaan mengikuti penyuluhan baik berupa bimbingan teknis atau pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait.

F. Pendapatan Nelayan Tangkap

Pendapatan nelayan tangkap diukur berdasarkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap bulannya dengan menggunakan standarisasi Upah Minimum Regional (UMR) Tahun 2006 sebesar Rp.625.000,-. Berdasarkan standarisasi tersebut, maka kategori pendapatan nelayan tangkap dibagi atas beberapa kategori yakni pendapatan <Rp.550.000,- dikategorikan sebagai pendapatan rendah, pendapatan Rp.550.000,- – Rp.750.000,- dikategorikan sebagai pendapatan sedang, pendapatan Rp.750.000,- – Rp.1.000.000,- dikategorikan sebagai pendapatan tinggi dan pendapatan >Rp.1.000.000,- dikategorikan sebagai pendapatan sangat tinggi.

Dari jumlah responden yang ada sebagaimana tercantum pada Tabel 12 menunjukkan bahwa nelayan tangkap sebanyak 32 orang atau

66% berpendapatan <Rp.550.000,- termasuk dalam kategori berpendapatan rendah, 12 orang atau 24% berpendapatan Rp.550.000,- – Rp.750.000,- termasuk dalam kategori berpendapatan sedang, 2 orang atau 4% berpendapatan Rp.750.000,- – Rp.1.000.000,- termasuk dalam kategori berpendapatan tinggi dan 3 orang atau 6% berpendapatan >Rp.1.000.000,- termasuk dalam kategori berpendapatan sangat tinggi.

Tabel 12. Tingkat pendapatan responden setiap bulan

NO	PENDAPATAN / BULAN	N	PERSENT. %
1	< Rp. 550.000	33	66,00
2	Rp. 550.000 – Rp. 750.000	12	24,00
3	Rp. 750.000 – Rp. 1.000.000	2	4,00
4	> Rp. 1.000.000	3	6,00
Jumlah		50	100,00

Berdasarkan data tersebut, maka pendapatan nelayan tangkap di pesisir pantai Kota Parepare pada umumnya termasuk dalam kategori berpendapatan rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang masih rendah, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa masih kurangnya tenaga profesional di sektor perikanan untuk melakukan penyuluhan, tingkat pendidikan nelayan tangkap masih tergolong rendah serta keterbatasan sarana yang digunakan dalam melakukan aktifitas melaut masih bersifat tradisional.

Berdasarkan hasil edaran kuisioner sebagaimana tertera pada Tabel 13, dapat diketahui lama bekerja atau pengalaman kerja sebagai nelayan tangkap >15 tahun berjumlah 34 orang atau 68%, 10–15 tahun berjumlah 8 orang atau 16%, 5–10 tahun berjumlah 6 orang atau 12% dan <5 tahun berjumlah 2 orang atau 4%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tercantum pada tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Pengalaman kerja responden

NO	LAMA BEKERJA	N	PERSENT. %
1	< 5 Tahun	2	4,00
2	5 – 10 Tahun	6	12,00
3	10 – 15 Tahun	8	16,00
4	> 15 Tahun	34	68,00
Jumlah		50	100,00

Pengalaman kerja responden dalam menekuni pekerjaan menunjuk bahwa responden pada umumnya sangat berpengalaman, namun pengalaman tersebut tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap hasil tangkapan yang diperoleh untuk perbaikan dan pemenuhan kehidupan responden. Hal tersebut dipengaruhi oleh musim yang sedang terjadi pada saat nelayan tangkap melakukan penangkapan ikan dan keterbatasan sarana yang digunakan.

G. Aktivitas Penangkapan ikan

Berdasarkan hasil edaran kuisisioner sebagaimana tercantum pada Tabel 14 mengenai intensitas penangkapan yang dilakukan oleh responden yang berjumlah 50 orang dibagi atas beberapa kategori yakni untuk intensitas penangkapan yang dilakukan tidak menentu dikategorikan selalu, untuk intensitas setiap hari dikategorikan sering, intensitas penangkapan setiap minggu dikategorikan jarang, intensitas penangkapan setiap bulan dikategorikan sangat jarang.

Tabel 14. Intensitas penangkapan ikan oleh responden

NO	INTENSITAS PENANGKAPAN	N	PERSENT. %
1	Tidak Menentu	20	40,00
2	Hari	27	54,00
3	Minggu	2	4,00
4	Bulan	1	2,00
Jumlah		50	100,00

Intensitas penangkapan yang dilakukan setiap hari oleh responden sebanyak 27 orang atau 54%, untuk Setiap minggu sebanyak 2 orang atau 4%, untuk setiap bulan 1 orang atau 2% dan responden yang intensitas penangkapannya tidak menentu sebanyak 20 orang atau 40%. Sesuai dengan data tersebut, maka intensitas rata-rata penangkapan yang dilakukan responden termasuk dalam kategori intensitas yang selalu

dan sering dilakukan baik setiap hari maupun intensitas penangkapan yang tidak menentu.

Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan bahan bakar minyak yang digunakan untuk melaut dan sarana yang digunakan masih bersifat tradisional sehingga jangkauan wilayah penangkapan terdekat di Bojo, Palanro, Ujung Lero dan terjauh di Awerange. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara tidak terstruktur dengan responden bahwa dalam melakukan aktifitas melaut, jangkauan wilayah penangkapan terjauh di Bojo dan Palanro (Kabupaten Barru) serta Ujung Lero (Kabupaten Pinrang).

Nelayan tangkap dalam melakukan aktifitas penangkapan hasil laut dilakukan pada waktu siang, malam, siang dan malam serta pada waktu tidak tertentu. Responden yang melakukan penangkapan pada waktu siang sebanyak 6 orang atau 12%, waktu malam sebanyak 20 orang atau 40%, waktu siang dan malam sebanyak 19 orang atau 38% dan waktu penangkapan tidak menentu sebanyak 5 orang atau 10%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa aktifitas penangkapan yang dilakukan oleh responden rata – rata dilakukan pada waktu malam hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Waktu operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh responden

NO	WAKTU OPERSI PENANGKAPAN	N	PERSENT. %
1	Siang	6	12,00
2	Malam	20	40,00
3	Siang dan Malam	19	38,00
4	Tidak Menentu	5	10,00
Jumlah		50	100,00

Kegiatan melaut yang dilakukan oleh nelayan tangkap rata-rata dilakukan pada malam hari, dipengaruhi oleh jenis alat tangkap dan alat tangkap yang digunakan masih bersifat tradisional serta keadaan suhu di siang hari sangat menguras tenaga sehingga nelayan banyak melakukan aktifitas menangkap ikan pada malam hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua HNSI Cab. Kota Parepare mengemukakan bahwa hal lain yang mempengaruhi nelayan tangkap cenderung melakukan kegiatan pencarian dan penangkapan ikan pada malam hari di pengaruhi oleh planton (makanan ikan) mengikuti cahaya bulan, sehingga pada malam hari tanpa cahaya bulan planton-planton mengikuti cahaya lampu yang digunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan.

Nelayan tangkap dalam melakukan aktifitas penangkapan membutuhkan biaya merupakan salah satu pertanyaan untuk mengetahui

besar biaya yang dibutuhkan telah terdapat dalam kuisisioner yang telah diedarkan. Untuk besar biaya <Rp.100.000,- dikategorikan biaya penangkapan rendah, untuk besar biaya penangkapan Rp.100.000,- – Rp.300.000,- dikategorikan sedang, untuk besar biaya penangkapan Rp.300.000,- – Rp.500.000,- dikategorikan tinggi dan untuk besar biaya penangkapan >Rp.500.000,- dikategorikan sangat tinggi.

Tabel 16. Besar biaya yang dibutuhkan responden dalam melakukan penangkapan ikan

NO	BESAR BIAYA YANG DIBUTUHKAN	N	PERSENT. %
1	< Rp. 100.000	31	62,00
2	Rp. 100.000 – Rp. 300.000	10	20,00
3	Rp. 300.000 – Rp. 500.000	8	16,00
4	> Rp. 500.000	1	2,00
Jumlah		50	100,00

Berdasarkan hasil kuisisioner sebagaimana tercantum pada Tabel 16 menunjukkan bahwa untuk besar biaya <Rp.100.000,- sebanyak 31 orang atau 62%, untuk besar biaya Rp.100.000,- – Rp.300.000,- sebanyak 10 orang atau 20%, untuk besar biaya Rp.300.000,- – Rp.500.000,- sebanyak 8 orang atau 16% dan untuk besar biaya >Rp.500.000,- sebanyak 1 orang atau 2%. Sesuai dengan data tersebut, maka rata-rata besar biaya yang dibutuhkan nelayan tangkap dalam melakukan penangkapan termasuk dalam kategori rendah.

Dalam melakukan aktifitas penangkapan yang dilakukan responden, ada yang membutuhkan bantuan tenaga dan ada pula yang tidak membutuhkan bantuan tenaga. Bantuan tenaga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah adanya tenaga kerja yang ikut serta melakukan penangkapan.

Berdasarkan hasil olah data kuisisioner menunjukkan bahwa responden yang menggunakan tenaga kerja sebanyak 21 orang atau 42% sedangkan responden yang tidak menggunakan tenaga kerja sebanyak 29 orang atau 58%. Sesuai dengan data tersebut, maka responden dalam melakukan aktifitas penangkapan rata-rata tidak menggunakan tenaga kerja atau penangkapan dilakukan seorang diri. Hal tersebut dipengaruhi oleh jenis pekerjaan nelayan tangkap merupakan pekerjaan pokok atau sampingan serta dipengaruhi juga oleh jenis alat tangkap dan alat tersebut dapat digunakan oleh 1 orang nelayan tangkap dalam melakukan aktifitas melaut.

Banyaknya hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh responden dibagi atas beberapa kategori yakni untuk hasil tangkapan < 50 kg dikategorikan dengan hasil tangkapan kurang, untuk hasil tangkapan 50 – 100 kg dikategorikan dengan hasil tangkapan sedang, untuk hasil tangkapan 100 – 250 kg dikategorikan dengan hasil tangkapan banyak dan untuk hasil tangkapan 250 - 500 kg dikategorikan dengan hasil tangkapan banyak sekali.

Tabel 17. Banyaknya hasil tangkapan yang diperoleh responden setiap kali melakukan penangkapan ikan

NO	BANYAKNYA HASIL TANGKAPAN	N	PERSENT. %
1	< 50 kg	40	80,00
2	50 – 100 kg	8	16,00
3	100 – 250 kg	1	2,00
4	250 – 500 kg	1	2,00
Jumlah		50	100,00

Berdasarkan hasil kuisioner sebagaimana tercantum pada Tabel 17 menunjukkan bahwa hasil tangkapan < 50 kg sebanyak 40 orang atau 80%, hasil tangkapan 50 – 100 kg sebanyak 8 orang atau 16%, hasil tangkapan 100 – 250 kg sebanyak 1 orang atau 2% dan hasil tangkapan 250 – 500 kg sebanyak 1 orang atau 2%. Sesuai dengan data tersebut, maka rata-rata hasil tangkapan yang diperoleh responden termasuk dalam kategori hasil tangkapan kurang. Hasil tangkapan nelayan dikategorikan kurang dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Musim yang terjadi pada saat melakukan aktifitas melaut

Nelayan tangkap dalam melakukan penangkapan ikan mengenal 3 pola musim, yang menentukan waktu-waktu intensif dan sepi aktivitas pemanfaatan sumber daya laut, yaitu musim barat, musim timur dan musim pancaroba.

Musim barat atau musim paceklik berlangsung pada bulan 12 – 6 ditandai dengan hujan lebat, angin/badai besar dan arus kuat dari arah barat ke timur atau kurang memungkinkan aktivitas nelayan. Musim timur atau musim pancaroba berlangsung antara bulan 7 – 12 ditandai dengan angin dan arus agak lemah dari timur ke barat memberikan peluang besar bagi nelayan untuk beroperasi secara intensif. Dan dari musim barat ke timur ada musim beralihan berlangsung selama ? 3 bulan (bulan 5 – 7) membawa angin dengan goncangan ombak kurang menentu tak henti-hentinya.

2. Jenis alat tangkap yang digunakan.

Untuk melakukan penangkapan ikan oleh nelayan dibutuhkan adanya alat tangkap. Berdasarkan Data Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Bidang Perikanan dan Kelautan Tahun 2005 terdapat 9 jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan tangkap di Kota Parepare antara lain : Hutate (Pole and Line), Gill Net (J.I.H dan J.I.T), Purse Seine, Payang, Bagan (Perahu dan tancap), Serok dan Pancing.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada nelayan tangkap sebagaimana tertera pada Tabel 18 menunjukkan bahwa nelayan yang menggunakan purse seiner sebanyak 3 orang atau 6%, Pukat sebanyak 11 orang atau 22%, Jala/Jaring/Lanra sebanyak 10 orang atau 20%, Pancing sebanyak 20 orang atau 40% dan

Bagan (Tancap/Perahu) sebanyak 6 orang atau 12 %. Dari data tersebut, nelayan tangkap yang menggunakan pancing dan pukat banyak digunakan nelayan disebabkan oleh alat tersebut dalam penggunaannya dapat terjangkau oleh perahu yang digunakan nelayan yang jarak tempuhnya terbatas serta jenis alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan 1 jenis alat tangkap.

Tabel 18. Jenis alat tangkap yang digunakan responden

NO	JENIS ALAT TANGKAP	N	PERSENT. %
1	Purse Seiner	3	6,00
2	Pukat	11	22,00
3	Jala/Jaring/Lanra	10	20,00
4	Pancing	20	40,00
5	Bagan Tancap/Perahu	6	12,00
Jumlah		50	100,00

3. Jenis alat perahu yang digunakan.

Alat transportasi juga sebagai pendukung dalam melakukan aktifitas penangkapan yang dilakukan oleh responden. Alat Transportasi yang dimaksud dalam hal ini adalah perahu ataupun kapal yang biasanya digunakan oleh responden.

Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana tercantum pada Tabel 19 menunjukkan bahwa nelayan tangkap banyak yang

menggunakan perahu tempel sebanyak 27 orang atau 54% sedangkan nelayan tangkap yang menggunakan perahu mesin dalam (>20GT) sebanyak 2 orang atau 4%. Sesuai dengan data tersebut, maka nelayan tangkap dominan menggunakan perahu yang masih bersifat tradisional sehingga jarak jangkauan penangkapan ikan nelayan juga terbatas .

Tabel 19. Jenis perahu yang digunakan oleh Responden

NO	JENIS PERAHU	N	PERSENT. %
1	Perahu Tanpa Motor	11	22,00
2	Perahu Motor Tempel	27	54,00
3	Perahu Mesin Dalam (5 – 20 GT)	10	20,00
4	Perahu Mesin Dalam (>20 GT)	2	4,00
Jumlah		50	100,00

Hal tersebut dipengaruhi oleh daya tampung perahu yang sedianya dapat mengikutsertakan anggota keluarga nelayan tangkap untuk membantu mencari nafkah, keterbatasan dana yang dimiliki untuk pengadaan perahu dengan menggunakan mesin dalam, selain itu dengan perahu tradisional tanpa menggunakan bahan bakar nelayan tetap dapat memperoleh bahan bakar walaupun harga bahan bakar mengalami kenaikan tersebut, ada juga nelayan yang menggunakan layar untuk menjalankan perahunya dengan jarak jangkauannya yang terbatas. Layar juga dapat digunakan sebagai alternatif apabila bahan bakar sulit didapatkan/langka ataupun antisipasi atas kenaikan bahan bakar, hal

tersebut serta memberikan pengaruh terhadap hasil produksi disebabkan jangkauan perahu tersebut sangat terbatas.

Hasil tangkapan responden dipasarkan atau didistribusikan pada beberapa tempat dengan tujuan untuk membantu memasarkan hasil tangkapan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Pangkalan Pelelangan Ikan (PPI) dengan kategori antara lain : Untuk responden yang menggunakan TPI/PPI dengan kategori sangat efisien, untuk responden yang menggunakan pasar tradisional dengan kategori efisien, untuk responden yang memasarkan hasil tangkapannya dengan langsung ke penjual dapat dikategorikan kurang efisien dan untuk responden yang memasarkan hasil tangkapannya kepada pengusaha dapat dikategorikan tidak efisien.

Tabel 20. Lokasi pemasaran hasil tangkapan responden

NO	LOKASI PEMASARAN HASIL TANGKAPAN	N	PERSENT. %
1	TPI/PPI	5	10,00
2	Langsung ke penjual	22	44,00
3	Pengusaha	15	30,00
4	Pasar Tradisional	8	16,00
Jumlah		50	100,00

Berdasarkan hasil edaran kuisisioner sebagaimana tercantum pada Tabel 20 menunjukkan bahwa responden yang memasarkan melalui

TPI/PPI sebanyak 5 orang atau 10%, untuk pemasaran melalui pasar tradisional sebanyak 8 orang atau 16%, untuk pemasaran langsung ke penjual sebanyak 22 orang atau 44% dan untuk pemasaran ke pengusaha sebanyak 15 orang atau 30%.

Sesuai dengan hasil olah data tersebut, maka rata – rata responden dalam memasarkan hasil tangkapannya langsung ke penjual serta ke pengusaha. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Penggunaan TPI/PPI kurang optimal oleh nelayan tangkap dalam memasarkan hasil tangkapannya. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Kepala UPTD TPI/PPI Kota Parepare bahwa TPI/PPI ada yang kurang efektif digunakan oleh nelayan tangkap disebabkan oleh air yang di sekitar TPI dangkal sehingga nelayan tangkap kesulitan untuk menambatkan perahunya.
2. Status kepemilikan alat tangkap dan perahu yang digunakan nelayan tangkap.
 - a. Alat Tangkap

Nelayan tangkap dalam hal ini sebagai responden untuk menekuni pekerjaannya memiliki alat tangkap, namun alat tangkap tersebut ada yang status kepemilikannya sudah menjadi milik pribadi dan adapula yang status kepemilikannya bukan milik pribadi. Status kepemilikan bukan milik pribadi dalam hal ini alat tangkap tersebut

sewaan, fasilitas yang diberikan oleh pengusaha dengan kesepakatan hasil tangkapan tidak dijual ke pasar tradisional ataupun PPI/TPI, fasilitas tersebut diberikan dengan sistem pengembalian untuk pengadaan fasilitas dibayar setiap bulannya kepada si pemberi fasilitas pengadaan barang.

Berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan bahwa responden dengan status kepemilikan sarana alat tangkap sebagai milik pribadi sebanyak 38 orang atau 76% sedangkan responden dengan status kepemilikan bukan milik pribadi sebanyak 12 orang atau 24%. Dari data tersebut, maka nelayan tangkap di Kota Parepare rata – rata telah memiliki alat tangkap atau alat tangkap yang digunakan merupakan milik pribadi.

Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan tangkap tetapi bukan milik pribadi tersebut merupakan alat yang dipinjam/sewa, nelayan yang belum memiliki alat tangkap disebabkan oleh keterbatasan dana untuk pengadaan alat tersebut serta belum adanya koperasi atau usaha yang bergerak dibidang perkreditan untuk pengadaan alat tersebut. Seiring dengan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Koperasi dan UKM bahwa Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan penguatan kelembagaan dengan cara membentuk kelompok nelayan, namun untuk pemberian bantuan melalui koperasi belum dianggarkan.

b. Perahu/Kapal

Alat transportasi atau perahu yang digunakan oleh responden sama halnya dengan alat tangkap, alat transportasi sebagai pendukung aktifitas penangkapan juga ada yang status kepemilikannya sudah menjadi milik pribadi dan adapula yang status kepemilikannya bukan milik pribadi. Status kepemilikan bukan milik pribadi dalam hal ini alat tangkap tersebut sewaan atau pinjaman, fasilitas yang diberikan oleh pengusaha dengan kesepakatan hasil tangkapan tidak dijual ke pasar tradisional ataupun TPI, fasilitas tersebut diberikan dengan sistem pengembalian untuk pengadaan fasilitas dibayar setiap bulannya kepada si pemberi fasilitas barang.

Berdasarkan hasil edaran kuisisioner menunjukkan bahwa responden dengan status kepemilikan sarana alat transportasi sebagai milik pribadi sebanyak 33 orang atau 66% sedangkan responden dengan status kepemilikan bukan milik pribadi sebanyak 17 orang atau 34%. Dari data tersebut, maka nelayan tangkap di Kota Parepare rata – rata telah memiliki perahu yang digunakan dan merupakan milik pribadi.

Kepemilikan alat transportasi atau perahu yang digunakan oleh responden lebih sedikit responden yang memiliki alat tangkap. Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur dengan nelayan tangkap bahwa nelayan tangkap yang tidak memiliki perahu

disebabkan oleh biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk 1 buah perahu tanpa motor dalam hal ini menggunakan layar ?Rp.2.000.000,- sedangkan alat tangkap berupa jala/jaring ?Rp.200.000,-.

H. Strategi Pengembangan Perikanan Laut

Pengembangan di sektor perikanan sangat memberikan peran penting khususnya bagi nelayan tangkap dalam mensejahterahkan keluarga mereka serta untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pada umumnya, dimana kebutuhan akan ikan dan atau hasil laut lainnya sebagai sumber daya alam yang dapat dengan mudah diperoleh oleh manusia dalam hal ini masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Untuk memenuhi hal tersebut, memerlukan strategi yang sesuai dengan potensi wilayah pesisir dan potensi yang dimiliki oleh responden.

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab III Metode Penelitian, bahwa untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare, maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor eksternal (FE) dan faktor internal (FI) yang terdiri dari peluang dan ancaman (FE) serta kekuatan dan kelemahan (FI).
2. Merumuskan faktor-faktor eksternal dan internal guna mendapatkan alternatif strategi

Langkah pertama dalam analisis ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Kemudian dianalisis faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan/kelemahan dan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang/ancaman. Sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian ini maka analisis kekuatan/kelemahan dan analisis peluang/ancaman, sebagaimana tercantum berikut ini:

1. Analisis kekuatan/kelemahan

- a. Kota Parepare sebagai Kota Pantai serta potensi lainnya

Letak Kota Parepare yang strategis berada di pesisir Teluk Makassar, didukung dengan aksesibilitas yang lancar baik jalur darat maupun laut sehingga dapat menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat dan Pulau Kalimantan serta antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi lain yang dimiliki kaitannya dengan peningkatan produksi perikanan tangkap yakni adanya Lembaga

Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai instalasi penginderaan jarak jauh sumber daya alam dapat mendeteksi keberadaan ikan.

b. Pendidikan Nelayan Tangkap

Berdasarkan hasil olah data primer menunjukkan bahwa responden yang tidak tamat SD 14 orang atau 28%, Tamat SD 19 orang atau 38%. Hal tersebut belum dapat memenuhi program pemerintah yakni Wajib Belajar 9 sedangkan responden yang Tamat SMP 6 orang atau 12% sehingga tingkat pendidikan nelayan tangkap tergolong rendah.

c. Pendapatan Nelayan Tangkap

Sesuai dengan hasil olah data primer yakni kuisisioner menunjukkan bahwa pendapatan nelayan tangkap dikategorikan rendah yakni terdapat 33 orang atau 66% nelayan yang berpendapatan <Rp.550.000,- hal tersebut belum memenuhi standarisasi Upah Minimum Regional (UMR) Tahun 2006 yakni sebesar Rp.625.000,-.

d. Alat tangkap dan transportasi yang digunakan oleh nelayan tangkap

Berdasarkan hasil olah data kuisisioner menunjukkan bahwa nelayan tangkap di Kota Parepare cenderung menggunakan pancing dan pukat, hal tersebut dipengaruhi oleh jarak jangkauan perahu yang digunakan nelayan terbatas.

Kondisi tersebut didukung dengan hasil olah data primer dari pembagian kuisisioner menunjukkan bahwa alat transportasi atau perahu/kapal yang digunakan oleh nelayan tangkap banyak yang menggunakan perahu tempel sebanyak 27 orang atau 54% sedangkan nelayan tangkap yang menggunakan perahu mesin dalam (>20GT) sebanyak 2 orang atau 4%. Sesuai dengan data tersebut, maka nelayan tangkap dominan menggunakan perahu yang masih bersifat tradisional. Perahu/Kapal dengan mesin dalam (>20GT) dapat menempuh jarak yang cukup jauh sehingga semakin jauh jarak tempuh harus didukung juga dengan mesin serta bahan bakar yang mencukupi.

e. TPI/PPI

Berdasarkan hasil edaran kuisisioner menunjukkan bahwa responden yang memasarkan melalui TPI/PPI sebanyak 5 orang atau 10%, untuk pemasaran melalui pasar tradisional sebanyak 8 orang atau 16%, untuk pemasaran langsung ke penjual sebanyak 22 orang atau 44% dan untuk pemasaran ke pengusaha sebanyak 15 orang atau 30%. Hal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan nelayan tangkap tidak menggunakan TPI/PPI disebabkan terlalu dangkalnya air di tepi TPI/PPI sehingga nelayan kesulitan untuk menambatkan perahunya dan adanya nelayan yang menjual hasil tangkapannya kepada para pengusaha yang telah memberikan fasilitas kepada nelayan tangkap untuk memperlancar penangkapan ikan.

2. Analisis peluang/ancaman

a. Industri Perikanan

Dengan letak yang berada di Pesisir Teluk Makassar mendukung bagi masyarakat khususnya nelayan tangkap ataupun keluarganya untuk mengolah hasil tangkapan ikan yang berdiam di wilayah tersebut. Adapun hasil olahan tersebut dapat dibuat menjadi abon ikan, ikan asin, ikan kering, Industri Es Balok, dan industri lainnya yang bergerak di sektor perikanan. Industri perikanan yang terdapat di Kota Parepare sebanyak 32 industri.

b. Sumber Permodalan

Nelayan tangkap masih kesulitan mendapatkan modal usaha penangkapan ikan serta untuk mengembangkan usaha industri rumah tangga yang dominan dilakukan oleh masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir. Namun keterlibatan pengusaha dari luar Kota Parepare yang memfasilitasi sarana seperti alat tangkap dan alat transportasi seperti perahu dan kapal dengan kontribusi hasil tangkapan nelayan dijual kepada pengusaha tersebut dalam jangka waktu tertentu sejak hasil tangkapan sampai di daratan. Belum adanya perbankan atau koperasi yang memberikan pinjaman tanpa agunan serta bunga kredit sebesar 0% untuk nelayan tangkap.

c. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah kaitannya dengan perikanan diantaranya program pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan pembangunan pangkalan pendaratan ikan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar, program peningkatan/pengembangan perkoperasian dan perdagangan dengan kegiatan bimbingan teknis dan pengemasan (packaging), labeling serta manajemen pemasaran bagi industri ruman tangga (abon ikan, sulaman bordir, kerajinan) dan kegiatan bimbingan teknis proses pengolahan ikan presto, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) pada tahun 2005 – 2007 dengan kegiatan kredit usaha tani, kedai pesisir dan SPDN/SPBN.

Untuk menentukan strategi pengembangan perikanan laut dalam hal ini perikanan tangkap dilakukan analisis terhadap potensi wilayah Kota Parepare dan SDM Nelayan tangkap dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal

Faktor internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal yang terdiri atas peluang dan ancaman, yang akan dibahas lebih lanjut dibawah ini.

1. Faktor Internal

Untuk mengetahui faktor internal pengembangan perikanan laut berbasis potensi masyarakat pesisir, telah dikemukakan sebagaimana halnya pada Bab III Metode Penelitian mengenai hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan dianalisis berdasarkan hasil kuisisioner dan wawancara.

a. Kekuatan (Strength : S)

- Kondisi Kota Parepare sebagai kota pantai dengan letak yang strategis
- Aksesibilitas pesisir pantai yang lancar dengan daerah lain
- Adanya masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap
- Adanya hasil produksi perikanan tangkap
- Potensi keberadaan LAPAN dengan penginderaan jarak jauh (citra satelit)
- Adanya PPITPI
- Usia nelayan tangkap tergolong dalam kelompok usia produktif

b. Kelemahan (Weaknesses : W)

- Tingkat pendidikan nelayan tangkap masih rendah
- Tenaga profesional/penyuluh di bidang perikanan masih kurang
- Adanya pendangkalan air di lokasi TPI

- Penataan sarana TPI/PPI belum optimal atau sarana belum menyatu dalam satu lokasi TPI/PPI
- Kelembagaan pemerintah di sektor perikanan belum optimal
- Tingkat pendapatan nelayan tangkap masih rendah
- Keterbatasan alat tangkap dan perahu/kapal yang digunakan nelayan tangkap
- Masih adanya nelayan tangkap yang tidak termasuk dalam kelompok nelayan sehingga kesulitan dalam memperoleh modal usaha
- Biaya Pendidikan bagi nelayan tangkap masih sangat mahal

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities : O)

- Adanya kebijakan pemerintah Kota Parepare
- Adanya instansi pemerintah yang menangani bidang perikanan dan perindustrian
- Adanya industri yang bergerak di sektor perikanan
- Kewenangan Daerah untuk mengembangkan potensi yang ada/Otonomi Daerah
- Sumber modal usaha yang di fasilitasi atas kerjasama pemerintah dan swasta/pengusaha
- Kebijakan Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan perikanan laut dalam hal ini perikanan tangkap

b. Ancaman (Threats : T)

- Pergantian pimpinan dalam roda pemerintahan
- Terjadinya degradasi lingkungan
- Adanya pengusaha/tengkulak yang menguasai nelayan tangkap
- Kenaikan harga dan kelangkaan BBM
- Adanya TPI/PPI di daerah lain

2. Penentuan strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare .

Sesuai dengan faktor-faktor internal (S dan W) dan faktor-faktor eksternal (O dan T), maka dapat diperoleh beberapa strategi. Adapun strategi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Strategi di bidang Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung terlaksananya visi Kota Parepare yakni “Mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera berkelanjutan di Kota Parepare yang berpantai dan berbukit indah serta berfungsi kuat sebagai pusat niaga, jasa dan pendidikan” dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki baik potensi SDA, SDM dan SDB yang ada.

Kota Parepare sebagai kota pantai dengan pusat kota yang berada pesisir Teluk Makassar serta dapat menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan pulau Kalimantan

serta Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan didukung dengan aksesibilitas yang lancar baik darat maupun laut. Kondisi tersebut mendorong penduduk untuk melakukan sebagian besar berada aktifitas di lokasi tersebut sehingga terjadi kepadatan dan penambahan penduduk di pesisir. Dengan demikian kompleksitas kegiatan bersifat heterogen, salah satu kegiatan penduduk atau masyarakat yang bermukim di pesisir sebagai nelayan tangkap.

Faktor yang berpengaruh dalam menentukan perkembangan wilayah yakni faktor sosial dalam hal ini faktor kependudukan dan kualitas kehidupan masyarakat. Standarisasi kualitas kehidupan masyarakat dengan mengacu pada program pemerintah pada bidang pendidikan dengan Wajib Belajar 9 tahun dan pendapatan penduduk diatas UMR Tahun 2006 sebesar Rp.625.000,-.

Kondisi masyarakat pesisir sebagai nelayan tangkap yang berada di pesisir Kota Parepare, berdasarkan hasil olah data primer menunjukkan bahwa pendidikan nelayan tangkap belum memenuhi program pemerintah yakni wajib belajar 9 tahun, hal tersebut didukung dengan wawancara dengan nelayan tangkap mengemukakan bahwa nelayan tersebut sejak kecil dituntut untuk mengikuti orang tua untuk mencari dan menangkap ikan sehingga pendidikan mereka tergolong masih rendah serta besar biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti

pendidikan bagi anak-anak nelayan tangkap tergolong mahal karena belum sebanding dengan besar pendapatan yang diperoleh tiap bulannya.

Berdasarkan dengan data yang peroleh menunjukkan bahwa pendapatan nelayan tangkap berada di bawah standar atau belum mencapai standar Upah Minimum Regional sehingga masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan jarak jangkauan perahu/kapal yang digunakan masih tradisional yakni perahu mesin tempel (katinting) dan alat tangkap yang digunakan nelayan hanya 1 jenis.

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan difasilitasi oleh beberapa instansi terkait sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang menangani bidang perikanan yakni Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (Dinas PKPK) sedangkan bidang industri oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah (Dinas Perindag dan PMD).

Pasca produksi perikanan tangkap yang ditekuni oleh nelayan diolah menjadi abon ikan, ikan asin dan ikan kering yang di produksi oleh industri rumah tangga yang berdiam di pesisir pantai. Kegiatan industri rumah tangga tersebut dikerjakan oleh anggota keluarga nelayan tangkap sebagai tambahan pendapatan. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perindag dan PMD terdapat 32 industri dengan 6 jenis usaha yang tekuni.

Dalam pengembangan usaha tersebut, baik industri maupun penangkapan ikan nelayan tangkap terkendala pada modal usaha yang sulit diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan tangkap bahwa untuk memperoleh modal usaha, mereka di fasilitasi oleh pengusaha yang bersedia memberikan fasilitas dengan ketentuan nelayan tangkap akan menjual hasil tangkapan kepada pengusaha tersebut sampai batas waktu pendaratan ikan dari laut dan harga ditetapkan oleh pengusaha tersebut.

Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan perikanan laut khusus perikanan tangkap berbasis potensi wilayah pesisir dengan menggunakan analisis SWOT, sebagaimana tercantum pada pembahasan Tabel 12.

Tabel 21. Matriks SWOT, Strategi engembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare pada bidang pengembangan sumber daya manusia

<p>INTERNAL</p>	<p>Kekuatan (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letak Kota Parepare yang strategis - Adanya hasil produksi perikanan tangkap - Potensi Keberadaan LAPAN - Usia nelayan tangkap tergolong dalam kelompok usia produktif 	<p>Kelemahan (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan nelayan tangkap masih rendah - Biaya pendidikan bagi nelayan tangkap masih sangat mahal - Tenaga professional/ penyuluh di bidang perikanan masih kurang - Tingkat pendapatan nelayan tangkap masih rendah
<p>EKSTERNAL</p> <p>Peluang (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan pemerintah Kota Parepare - Adanya instansi pemerintah yang menangani bidang perikanan dan perindustrian - Adanya industri yang bergerak di sektor perikanan 	<p>Strategi S – O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan industri pasca produksi perikanan - Penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan 	<p>Strategi W – O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekrutmen bagi tenaga penyuluh di bidang perikanan - Mengadakan, pendidikan, latihan dan penyuluhan bagi nelayan tangkap - Kebijakan pemerintah/regulasi bagi pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun
<p>Ancaman (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengusaha atau tengkulak yang menguasai nelayan tangkap 	<p>Strategi S – T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi perikanan tangkap - Pembentukan kredit usaha/koperasi nelayan atau dengan pemberian bantuan/subsidi sebagai modal usaha 	<p>Strategi W – T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan produksi perikanan

2. Strategi di bidang Infrastruktur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi tentang adanya TPI yang kurang dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan tangkap. Berdasarkan hasil olah data primer menunjukkan bahwa nelayan tangkap rata-rata langsung menjual hasil tangkapannya langsung ke penjual serta ke pengusaha sehingga TPI/PPI kurang digunakan secara optimal dalam memasarkan hasil tangkapan nelayan.

Nelayan tangkap menjual ke pengusaha disebabkan oleh nelayan sebelumnya telah mempunyai kesepakatan dengan pengusaha yang memberikan fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan tangkap Kepala UPTD TPI/PPI mengemukakan bahwa TPI Sumpang Minangae yang berada di Jalan Poros Kota Parepare – Barru kurang dimanfaatkan oleh nelayan karena air di TPI tersebut dangkal sehingga kesulitan untuk menambatkan perahu dan menurunkan hasil tangkapan. Kota Parepare berbatasan dengan Kabupaten Pinrang yang memiliki TPI di Ujung Lero.

Keterbatasan alat tangkap dan perahu/kapal yang digunakan nelayan tangkap dalam melakukan aktifitas penangkapan merupakan salah satu kendala yang dihadapi, baik dari segi status kepemilikan ataupun jenis alat tangkap yang digunakan sama halnya dengan perahu/kapal Nelayan tangkap rata-rata hanya memiliki 1 jenis alat tangkap untuk melakukan penangkapan ikan.

Perahu atau kapal yang digunakan juga sangat memberikan pengaruh terhadap produksi hasil perikanan laut, nelayan tangkap dominan masih menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel yang masih bersifat tradisional. Dengan keterbatasan perahu/kapal yang digunakan juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jarak jangkauan untuk menangkap ikan sedangkan untuk membuat perahu dibutuhkan biaya ? Rp. 2.000.000,-. Dalam mengoperasikan perahu yang menggunakan motor tempel ataupun mesin dalam membutuhkan bahan bakar sedangkan sejak terjadinya krisis moneter bahan bakar minyak mengalami kenaikan harga dan kelangkaan di pasaran.

Berdasarkan data sekunder Dinas PKPK Kota Parepare terdapat sarana TPI/PPI berupa alat cold storage berada di Pasar Lakessi namun belum memiliki bangunan untuk tempat penyimpanan alat tersebut. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun 2005 berupa kedai pesisir dan kredit usaha nelayan yang berada di TPI Sumpang Minangae dan Solar Pocket Dealer Nelayan (SPDN) tahun 2006-2007.

Berdasarkan uraian tersebut, maka salah satu strategi dalam pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare dengan menggunakan alat analisis SWOT, sebagai berikut:

Tabel 22. Matriks SWOT, Strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare pada bidang pengembangan infrastruktur

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p>	<p>Kekuatan (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Kota Parepare sebagai kota pantai dengan letak yang strategis - Aksesibilitas pesisir pantai yang lancar dengan daerah lain - Adanya PPI/TPI 	<p>Kelemahan (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Pendangkalan air di lokasi TPI - Penataan sarana PPI belum optimal (sarana belum menyatu dalam 1 lokasi PPI) - Adanya keterbatasan alat tangkap dan perahu/kapal yang digunakan nelayan tangkap
	<p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p> <p>Peluang (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan perikanan laut khususnya perikanan tangkap - Sumber modal usaha yang difasilitasi oleh pengusaha 	<p>Strategi S – O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan atau pembangunan infrastruktur TPI/PPI dilengkapi dengan sarana dasar - Pembukaan lahan dengan reklamasi pantai - Peningkatan produksi perikanan tangkap
<p>Ancaman (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya TPI/PPI di daerah lain - Kenaikan dan kelangkaan BBM - Terjadinya degradasi lingkungan 	<p>Strategi S – T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kelompok Nelayan untuk penguatan kelembagaan - Meningkatkan daya saing TPI/PPI yang ada dengan daerah lain 	<p>Strategi W – T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pengelolaan TPI/PPI diserahkan kepada pihak swasta - Mempertahankan kelestarian pesisir pantai

3. Strategi di bidang Kebijakan Pemerintah

Kota Parepare yang terletak di Teluk Makassar sehingga menjadi kota pantai dengan pusat kota yang berada pesisir pantai. Sebagai kota pantai pemerintah setempat dalam menjalankan birokrasi pemerintahan di fasilitasi oleh Bidang Perikanan dan Kelautan pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (Dinas PKPK) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Program pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan pembangunan pangkalan pendaratan ikan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar merupakan salah satu program pengembangan perikanan laut khususnya perikanan tangkap, lokasi pelaksanaan pembangunan PPI berada di RW. Menara Cempae Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang berjarak \pm 1 Km dari Kota Parepare.

Penangkapan ikan yang dikerjakan oleh nelayan tangkap membutuhkan alat tangkap dan perahu yang menunjang produksi perikanan tangkap, namun alat tangkap dan perahu masih bersifat tradisional sehingga jarak jangkauan sangat terbatas yang mempengaruhi produksi perikanan. Untuk memperoleh alat tangkap dan perahu/kapal yang memadai, nelayan tangkap tersebut tergabung dalam kelompok nelayan. Salah satu program bagi perekonomian masyarakat pesisir memberikan fasilitas bagi nelayan tangkap yang tergabung dalam

kelompok nelayan yakni Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2005 -2007. Dengan kegiatan berupa Kredit Usaha Nelayan, Kedai Pesisir dan Solar Pocket Dealer Nelayan (SPDN). SPDN merupakan perpaduan program PEMP dengan Program Pembangunan PPI Cempae, peralatan mesin bahan bakar solar merupakan pengadaan program PEMP, bangunan tempat menyimpan peralatan mesin bahan bakar solar merupakan pengadaan Program Pembangunan PPI Cempae dan pasokan bahan bakar solar kerjasama dengan Depot Pertamina Wilayah Parepare.

Untuk pengembangan industri perikanan, Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2006 antara lain program peningkatan/pengembangan perkoperasian dan perdagangan dengan kegiatan bimbingan teknis dan pengemasan (packaging), labeling serta manajemen pemasaran bagi industri ruman tangga (abon ikan, sulaman bordir, kerajinan) dan kegiatan bimbingan teknologi proses pengolahan ikan presto.

Untuk promosi dan pemasaran hasil produksi perikanan yang difasilitasi oleh Dinas Peindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah, Tahun 2007 dilakukan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan kegiatan keikutsertaan pameran di luar provinsi 3 kali dan di tingkat provinsi 1 kali. Kegiatan tersebut diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan industri rumah tangga dengan adanya permintaan melalui pameran yang dilaksanakan dan dapat mendorong hasil produksi perikanan dapat lebih ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Untuk pengembangan peningkatan usaha perikanan dan meningkatkan kembali hasil produksi perikanan, maka pemerintah merencanakan program sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Parepare tahun 2006 – 2008 antara lain pengkajian lokasi dan pengembangan budidaya teripang, penataan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, pembinaan pasca panen perikanan, pembinaan usaha penangkapan ikan.

Berdasarkan data dan informasi Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas PKPK Kota Parepare menunjukkan penurunan hasil produksi perikanan yang drastis, hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa hal antara lain fenomena alam, adanya kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak serta keterbatasan alat tangkap dan perahu/kapal yang digunakan oleh nelayan tangkap.

Dengan demikian perlu adanya strategi kebijakan pemerintah dalam pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah di Kota Parepare dengan menggunakan analisis SWOT, sebagaimana tercantum berikut ini:

Tabel 23. Matriks SWOT, Strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare pada bidang kebijakan pemerintah

<p>INTERNAL</p>	<p>Kekuatan (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap - Adanya hasil produksi perikanan tangkap 	<p>Kelemahan (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan Pemerintah di sektor perikanan belum optimal - Masih adanya nelayan tangkap yang tidak termasuk dalam kelompok nelayan sehingga kesulitan dalam memperoleh modal usaha
<p>EKSTERNAL</p> <p>Peluang (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya instansi yang menangani bidang perikanan - Kewenangan Daerah untuk mengembangkan potensi yang ada/Otonomi Daerah 	<p>Strategi S – O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program dan kegiatan di sektor perikanan tangkap - Peningkatan produksi perikanan - Promosi dan Pemasaran hasil produksi perikanan 	<p>Strategi W – O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kelembagaan pemerintah di sektor perikanan - Meningkatkan SDM nelayan tangkap
<p>Ancaman (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergantian pimpinan dalam roda pemerintahan - Kenaikan harga dan kelangkaan BBM 	<p>Strategi S – T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberdayakan LSM Perikanan sebagai fasilitator nelayan tangkap dalam menyalurkan aspirasinya. 	<p>Strategi W – T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pemerintah/ regulasi bagi sektor perikanan - Mengadakan kerjasama dengan perbankan atau swasta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi wilayah pesisir Kota Parepare antara lain letak yang strategis dengan aksesibilitas pesisir pantai yang lancar dengan daerah lain, kondisi Kota Parepare sebagai kota pantai, potensi keberadaan LAPAN yang memberikan kontribusi terhadap aktifitas penangkapan ikan oleh nelayan dan adanya PP/TPI. Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut yakni SDM nelayan tangkap yang masih rendah, keterbatasan sarana yang dipergunakan nelayan tangkap, kemungkinan terjadinya bencana alam, adanya pengusaha yang dari luar daerah dan kenaikan harga serta kelangkaan BBM.
2. Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan produksi perikanan laut guna mensejahterakan kehidupan nelayan tangkap, antara lain :
 1. Strategi di bidang pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
 - a. Mengadakan pendidikan, latihan dan penyuluhan bagi nelayan tangkap

- b. Penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan
 - c. Rekrutmen bagi tenaga penyuluh di bidang perikanan
 - d. Mendorong peningkatan produksi dan pengembangan industri pasca produksi perikanan
 - e. Pembentukan kredit usaha/koperasi nelayan atau dengan bantuan/subsidi sebagai modal usaha
2. Strategi di bidang pengembangan infrastruktur, antara lain:
- a. Pembukaan lahan dengan reklamasi pantai untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur TPI/PPI dilengkapi dengan sarana dasar sehingga dapat berdaya saing dengan TPI/PPI yang ada di daerah lain
 - b. Pengadaan alat tangkap dan perahu/kapal serta penataan sarana pendukung di lokasi TPI/TPI
 - c. Mempertahankan kelestarian pesisir pantai
 - d. Pengembangan dan pengelolaan TPI/PPI diserahkan kepada pihak swasta
 - e. Pembentukan kelompok nelayan untuk penguatan kelembagaan
3. Strategi di bidang kebijakan pemerintah , antara lain:
- a. Adanya program dan kegiatan bagi pengembangan perikanan tangkap
 - b. Promosi dan pemasaran hasil produksi perikanan

- c. Penguatan kelembagaan pemerintah di sektor perikanan
- d. Memberdayakan LSM sebagai fasilitator nelayan tangkap dalam menyalurkan aspirasinya
- e. Mengadakan kerjasama dengan perbankan dan swasta

B. Saran

Dengan berdasarkan hasil penelitian mengenai potensi yang dimiliki oleh nelayan tangkap baik potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, maka dalam mengembangkan perikanan laut khususnya perikanan tangkap dapat disarankan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan dan masukan, antara lain :

1. Pengembangan dan memperluas wawasan Sumber Daya Manusia dengan mengikut sertakan nelayan tangkap pada penyuluhan dan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi baik pengetahuan mengenai tata cara penangkapan, pengemasan hasil industri produksi perikanan.
2. Memberdayakan masyarakat khususnya mengenai pemberdayaan perempuan/peran wanita dalam pengembangan usaha dan pemenuhan kebutuhan hidup ataupun anggota keluarga lainnya dengan meningkatkan keterampilan untuk menunjang kesejahteraan keluarga dengan melakukan pengolahan produksi rumah tangga (industri rumah tangga).

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, ST,MT. 2004. *Kutub dan Pusat Pertumbuhan sebagai Konsep Pengembangan Wilayah*. Tadulako University Press: Palu.
- Arifin, Edi. 2006. *Nelayan Kemiskinan dan Pembangunan*. Masagena Press: Makassar.
- Arman, Andi Baso. Edisi IX Bulan September Tahun 2006. *Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir Laut*. Bandar Madani (Buletin Internal Pemnda Kota Parepare, 10).
- Arifuddin. 2004. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Wilayah Pesisir di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Makassar: Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Budiharsono, Sugeng. 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Consuelo G. S. dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Universitas Indonesia (UI – Press): Jakarta.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., Sitepu, M.J. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Dahuri, R. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kota Parepare. 2005. *Daftar Inventarisasi Kewenangan dan Urusan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare*. Parepare: Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- Sub Dinas Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-pulau kecil. 2003. *Buku Pegangan Seksi Teknologi Penangkapan dan Kapal Perikanan*. Makassar: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Fauzi, A., Anna, S. 2005. *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Isma, Muslimah. 2002. *Faktor Penghambat Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sinjai*. Makassar: Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Bappeda, BPS Kota Parepare. 2005. *Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2004/2005*. Parepare: BAPPEDA dan BPS Kota Parepare.
- Nabiel, Makarin. 2001. *Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta : Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Mattulada. 1997. *Pembangunan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press: Ujung Pandang.
- Mubyarto, dkk. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologis di Dua Desa Pantai*. Rajawali Press: Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2001. *Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21*. Gramedia: Jakarta.
- Satria, A. 2002. *Pengantar Sosial Masyarakat Pesisir*. PT. Pustaka Cidesindo: Jakarta.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik : Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grasindo: Jakarta.
- Singarimbun, M., Effendi, S. 1987. *Metode Penelitian Survei*. PT. Pustaka LP3ES: Jakarta.
- Soekanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suharto. E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Sujarto, D. 1990. *Perencanaan Kota Baru*. Institut Teknologi Bandung: Bandung
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Bima Grafika: Jakarta.

- Supriharyono. 2002. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Asdar, CV. 2004. *Laporan Akhir Studi Kelayakan PPI Kota Parepare*. Pemerintah Kota Parepare: Parepare.

DOKUMEN - DOKUMEN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah*. 2005. Surabaya: Serba Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. 2005. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Nomor Replik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 2005. Surabaya: Serba Jaya.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2006 – 2008*. 2006. Parepare: BAPPEDA Kota Parepare.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2006*. 2006. Parepare: BAPPEDA Kota Parepare.

Lampiran 4 : Hasil Kuisisioner berdasarkan Karakteristik Responden

No	Responden	Jenis Kelamin		Usia		Jmlh Ang. Kel		Pendidikan		Biaya Pendidikan	
1	Lahabe	A	Laki-laki	D	> 42	C	7 - 9 Orang	D	SMA/SMK	A	< Rp. 300.000
2	Hamsi	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	C	SMP	A	< Rp. 300.000
3	Rusdi	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	B	SD	A	< Rp. 300.000
4	Alimuddin	A	Laki-laki	C	31 - 41	B	4 - 6 Orang	D	SMA/SMK	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
5	Sakka	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	A	Tidak Tamat SD	A	< Rp. 300.000
6	Baharuddin	A	Laki-laki	C	31 - 41	A	1 - 3 Orang	D	SMA/SMK	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
7	Hamirullah	A	Laki-laki	C	31 - 41	D	> 10	B	SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
8	Burhan	A	Laki-laki	C	31 - 41	C	7 - 9 Orang	A	Tidak Tamat SD	A	< Rp. 300.000
9	Lamalliweng	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	A	Tidak Tamat SD	A	< Rp. 300.000
10	Fandi	A	Laki-laki	B	20 - 30	A	1 - 3 Orang	A	Tidak Tamat SD	-	-
11	Said	A	Laki-laki	C	31 - 41	A	1 - 3 Orang	C	SMP	-	-
12	Fransiskus	A	Laki-laki	D	> 42	A	1 - 3 Orang	D	SMA/SMK	C	Rp. 500.000 - Rp. 700.000
13	P. Tahir Ahmad	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	C	SMP	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
14	Jupri Cambang	A	Laki-laki	B	20 - 30	A	1 - 3 Orang	B	SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
15	Lananong	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	B	SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
16	Muh. Sadik	A	Laki-laki	D	> 42	A	1 - 3 Orang	A	Tidak Tamat SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
17	Beddu Asse	A	Laki-laki	C	31 - 41	A	1 - 3 Orang	B	SD	A	< Rp. 300.000
18	Umar	A	Laki-laki	C	31 - 41	B	4 - 6 Orang	A	Tidak Tamat SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
19	Rahmani	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	B	SD	A	< Rp. 300.000
20	Muh. Ali	A	Laki-laki	C	31 - 41	B	4 - 6 Orang	D	SMA/SMK	A	< Rp. 300.000
21	Bustan Kasim	A	Laki-laki	C	31 - 41	B	4 - 6 Orang	B	SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
22	Muh. Tahir	A	Laki-laki	B	20 - 30	B	4 - 6 Orang	D	SMA/SMK	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
23	Hasrulla	A	Laki-laki	B	20 - 30	B	4 - 6 Orang	A	Tidak Tamat SD	A	< Rp. 300.000
24	Bakri B	A	Laki-laki	C	31 - 41	B	4 - 6 Orang	B	SD	C	Rp. 500.000 - Rp. 700.000

Lanjutan Lampiran 4

No	Responden	Jenis Kelamin		Usia		Jmlh Ang. Kel		Pendidikan		Biaya Pendidikan	
25	H. M. Akib	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	C	SMP	D	> Rp. 700.000
26	Husen	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	B	SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
27	Awis	A	Laki-laki	B	20 - 30	B	4 - 6 Orang	C	SMP	A	< Rp. 300.000
28	Mahmudin	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	A	Tidak Tamat SD	A	< Rp. 300.000
29	Bahar	A	Laki-laki	B	20 - 30	B	4 - 6 Orang	B	SD	A	< Rp. 300.000
30	Laco	A	Laki-laki	D	> 42	A	1 - 3 Orang	B	SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
31	Husba	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	B	SD	-	-
32	Alimuddin	A	Laki-laki	C	31 - 41	C	7 - 9 Orang	B	SD	A	< Rp. 300.000
33	Abdullah Rivai Laco	A	Laki-laki	D	> 42	C	7 - 9 Orang	C	SMP	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
34	Syahrul	A	Laki-laki	C	31 - 41	C	7 - 9 Orang	D	SMA/SMK	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
35	Aminuddin	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	D	SMA/SMK	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
36	Arsyad	A	Laki-laki	D	> 42	A	1 - 3 Orang	A	Tidak Tamat SD	-	-
37	Yusuf	A	Laki-laki	C	31 - 41	A	1 - 3 Orang	B	SD	A	< Rp. 300.000
38	Suardi	A	Laki-laki	B	20 - 30	B	4 - 6 Orang	B	SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
39	Arifin Kangka	A	Laki-laki	D	> 42	C	7 - 9 Orang	B	SD	D	> Rp. 700.000
40	Abd. Salam	A	Laki-laki	D	> 42	D	> 10 Orang	A	Tidak Tamat SD	A	< Rp. 300.000
41	M. Yunus Wero	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	A	Tidak Tamat SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
42	Lasude	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	B	SD	-	-
43	Sudirman	A	Laki-laki	C	31 - 41	B	4 - 6 Orang	B	SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
44	La Coe	A	Laki-laki	D	> 42	C	7 - 9 Orang	A	Tidak Tamat SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
45	Yakub	A	Laki-laki	C	31 - 41	B	4 - 6 Orang	A	Tidak Tamat SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
46	Kuraes Husain	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	D	SMA/SMK	D	> Rp. 700.000
47	Muh. Thamrin Temu	A	Laki-laki	D	> 42	B	4 - 6 Orang	B	SD	C	Rp. 500.000 - Rp. 700.000
48	Hj. Haryuti	B	Perempuan	D	> 42	B	4 - 6 Orang	D	SMA/SMK	D	> Rp. 700.000

49	Saad	A	Laki-laki	D	> 42	A	1 - 3 Orang	A	Tidak Tamat SD	B	Rp. 300.000 - Rp. 500.000
50	Hj. Sri	B	Perempuan	D	> 42	B	4 - 6 Orang	E	Akademi/PT	C	Rp. 500.000 - Rp. 700.000

Lampiran 5a : Hasil Kuisisioner berdasarkan Tingkat Pendapatan Responden

No	Responden	Lama Bekerja		Pokok Atau Sampingan		Pokok		Ang. Kel. Nafkah Ada/Tdk		Siapa	Jenis Kerja	Rata-Rata Pendapatan	
1	Lahabe	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
2	Hamsi	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
3	Rusdi	D	> 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Isteri	Wiraswasta	A	< Rp. 550.000
4	Alimuddin	D	> 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Isteri	Wiraswasta	A	< Rp. 550.000
5	Sakka	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
6	Baharuddin	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
7	Hamirullah	C	10 - 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Isteri	Wiraswasta	D	> Rp. 1.000.000
8	Burhan	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
9	Lamalliweng	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
10	Fandi	A	< 5	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
11	Said	A	< 5	B	Sampingan	C	Buruh	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
12	Fransiskus	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
13	P. Tahir Ahmad	D	> 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Anak	Buruh Harian	A	< Rp. 550.000
14	Jupri Cambang	B	5 - 10	A	Pokok	-	-	A	Ada	Anak	Buruh Harian	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
15	Lananong	D	> 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Anak	Buruh	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
16	Muh. Sadik	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
17	Beddu Asse	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
18	Umar	D	> 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Anak	Tukang Batu	A	< Rp. 550.000
19	Rahmani	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
20	Muh. Ali	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
21	Bustan Kasim	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
22	Muh. Tahir	C	10 - 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
23	Hasrulla	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000

24	Bakri B	C	10 - 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Anak	Nelayan	A	< Rp. 550.000
----	---------	---	---------	---	-------	---	---	---	-----	------	---------	---	---------------

Lanjutan Lampiran 5a

No	Responden	Lama Bekerja		Pokok Atau Sampingan		Pokok		Ang. Kel. Nafkah Ada/Tdk		Siapa	Jenis Kerja	Rata-Rata Pendapatan	
25	H. M. Akib	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
26	Husen	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
27	Awis	C	10 - 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
28	Mahmudin	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
29	Bahar	C	10 - 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Anak	Nelayan	A	< Rp. 550.000
30	Laco	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
31	Husba	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
32	Alimuddin	D	> 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Isteri	Penjahit Gorden	C	Rp. 750.000 - Rp. 1.000.000
33	Abdullah Rivai Laco	D	> 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Isteri	Salon Kecantikan	C	Rp. 750.000 - Rp. 1.000.000
34	Syahrul	B	5 - 10	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
35	Aminuddin	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
36	Arsyad	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
37	Yusuf	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
38	Suardi	B	5 - 10	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
39	Arifin Kangka	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
40	Abd. Salam	D	> 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Anak	Nelayan	A	< Rp. 550.000
41	M. Yunus Wero	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
42	Lasude	D	> 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Anak	Nelayan	A	< Rp. 550.000
43	Sudirman	B	5 - 10	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
44	La Coe	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	A	< Rp. 550.000
45	Yakub	D	> 15	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000

46	Kuraes Husain	B	5 - 10	B	Sampingan	B	Karyawan	A	Ada	Anak	Sopir	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
47	Muh. Thamrin Temu	B	5 - 10	A	Pokok	-	-	B	Tidak Ada	-	-	B	Rp. 550.000 - Rp. 750.000
48	Hj. Haryuti	C	10 - 15	B	Sampingan	A	PNS	B	Tidak Ada	-	-	D	> Rp. 1.000.000
49	Saad	C	10 - 15	A	Pokok	-	-	A	Ada	Isteri	PNS	A	< Rp. 550.000
50	Hj. Sri	C	10 - 15	B	Sampingan	A	PNS	B	Tidak Ada	-	-	D	> Rp. 1.000.000

Lampiran 5b

No	Responden	Melaut Per		Dana yg dibutuhkan		Tenaga Kerja Ya/Tdk		Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah Hasil Tangkapan	
1	Lahabe	A	Hari, 2 kali	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
2	Hamsi	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
3	Rusdi	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
4	Alimuddin	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
5	Sakka	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
6	Baharuddin	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
7	Hamirullah	A	Hari, 1 kali	B	Rp. 100.000 - Rp. 300.000	A	Ya	B	3 - 5 Orang	A	< 50 Kg
8	Burhan	A	Hari, 1 kali	B	Rp. 100.000 - Rp. 300.000	A	Ya	A	< 3 Orang	A	< 50 Kg
9	Lamalliweg	A	Hari, 2 kali	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
10	Fandi	A	Hari, 3 kali	D	> Rp. 500.000	B	Tidak	-	-	D	250 - 500 Kg
11	Said	D	Tidak menentu	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
12	Fransiskus	A	Hari,	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
13	P. Tahir Ahmad	A	Hari, 2 kali	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
14	Jupri Cambang	A	Hari, 3 kali	B	Rp. 100.000 - Rp. 300.000	A	Ya	A	< 3 Orang	C	100 250 Kg
15	Lananong	A	Hari, 3 kali	B	Rp. 100.000 - Rp. 300.000	A	Ya	A	< 3 Orang	B	50 - 100 Kg
16	Muh. Sadik	D	Tidak menentu	B	Rp. 100.000 - Rp. 300.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
17	Beddu Asse	D	Tidak menentu	C	Rp. 300.000 - Rp. 500.000	A	Ya	D	> 7 Orang	B	50 - 100 Kg
18	Umar	D	Tidak menentu	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
19	Rahmani	D	Tidak menentu	C	Rp. 300.000 - Rp. 500.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
20	Muh. Ali	D	Tidak menentu	C	Rp. 300.000 - Rp. 500.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
21	Bustan Kasim	D	Tidak menentu	C	Rp. 300.000 - Rp. 500.000	A	Ya	D	> 7 Orang	A	< 50 Kg
22	Muh. Tahir	D	Tidak menentu	C	Rp. 300.000 - Rp. 500.000	A	Ya	D	> 7 Orang	A	< 50 Kg
23	Hasrulla	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	B	50 - 100 Kg

Lanjutan Lampiran 5b

No	Responden	Melaut Per		Dana yg dibutuhkan	Tenaga Kerja Ya/Tdk		Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah Hasil Tangkapan			
24	Bakri B	A	Hari, 1 kali	B	Rp. 100.000 - Rp. 300.000		A	Ya	A	< 3 Orang	A	< 50 kg
25	H. M. Akib	D	Tidak menentu	C	Rp. 300.000 - Rp. 500.000		A	Ya	D	> 7 orang	A	< 50 Kg
26	Husen	D	Tidak menentu	A	< Rp. 100.000		B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
27	Awis	D	Tidak menentu	C	Rp. 300.000 - Rp. 500.000		B	Tidak	-	-	B	50 - 100 Kg
28	Mahmudin	D	Tidak menentu	B	Rp. 100.000 - Rp. 300.000		A	Ya	A	< 3 Orang	A	< 50 Kg
29	Bahar	A	Hari, 2 kali	A	< Rp. 100.000		A	Ya	B	3 - 5 Orang	A	< 50 Kg
30	Laco	C	Bulan, 3 kali	A	< Rp. 100.000		B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
31	Husba	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000		B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
32	Alimuddin	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000		B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
33	Abdullah Rivai Laco	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000		A	Ya	A	< 3 Orang	A	< 50 Kg
34	Syahrul	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000		A	Ya	A	< 3 Orang	A	< 50 Kg
35	Aminuddin	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000		B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
36	Arsyad	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000		B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
37	Yusuf	A	Hari, 1 kali	C	Rp. 300.000 - Rp. 500.000		A	Ya	C	5 - 7 Orang	B	50 - 100 Kg
38	Suardi	D	Tidak menentu	A	< Rp. 100.000		A	Ya	B	3 - 5 Orang	A	< 50 Kg
39	Arifin Kangka	D	Tidak menentu	B	Rp. 100.000 - Rp. 300.000		A	Ya	D	> 7 Orang	B	50 - 100 Kg
40	Abd. Salam	D	Tidak menentu	B	Rp. 100.000 - Rp. 300.000		A	Ya	D	> 7 Orang	B	50 - 100 Kg
41	M. Yunus Wero	D	Tidak menentu	A	< Rp. 100.000		B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
42	Lasude	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000		B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
43	Sudirman	A	Hari, 3 kali	A	< Rp. 100.000		A	Ya	A	< 3 Orang	A	< 50 Kg
44	La Coe	D	Tidak menentu	A	< Rp. 100.000		B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg

45	Yakub	D	Tidak menentu	B	Rp. 100.000 - Rp. 300.000	A	Ya	B	3 - 5 Orang	B	50 - 100 Kg
----	-------	---	---------------	---	---------------------------	---	----	---	-------------	---	-------------

Lanjutan Lampiran 5b

No	Responden	Melaut Per		Dana yg dibutuhkan		Tenaga Kerja Ya/Tdk		Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah Hasil Tangkapan	
46	Kuraes Husain	D	Tidak menentu	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
47	Muh. Thamrin Temu	D	Tidak menentu	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
48	Hj. Haryuti	B	Minggu, 2 kali	A	< Rp. 100.000	A	Ya	B	3 - 5 Orang	A	< 50 Kg
49	Saad	A	Hari, 1 kali	A	< Rp. 100.000	B	Tidak	-	-	A	< 50 Kg
50	Hj. Sri	B	Minggu, 3 kali	A	< Rp. 100.000	A	Ya	A	< 3 Orang	A	< 50 Kg

Lampiran 6 : Hasil Kuisisioner berdasarkan Sarana Alat Tangkap dan Transportasi yang digunakan responden

No	Responden	Status Alat Tangkap	Jenis Alat Tangkap	Status Alat Transportasi	Jenis Perahu	Waktu Menangkap
1	Lahabe	A Milik Pribadi	C Jala	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
2	Hamsi	A Milik Pribadi	C Jala	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
3	Rusdi	A Milik Pribadi	C Jala	B Bukan Milik Pribadi	A Tanpa Motor	B Malam
4	Alimuiddin	B Bukan Milik Pribadi	C Jala	B Bukan Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
5	Sakka	A Milik Pribadi	C Jala	A Milik Pribadi	A Tanpa Motor	B Malam
6	Baharuddin	B Bukan Milik Pribadi	A Purse Seiner	B Bukan Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
7	Hamirullah	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
8	Burhan	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
9	Lamalliweng	A Milik Pribadi	B Pukat	B Bukan Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
10	Fandi	B Bukan Milik Pribadi	D Pancing	B Bukan Milik Pribadi	C Mesin Dlm (5-20 GT)	C Siang dan Malam
11	Said	B Bukan Milik Pribadi	D Pancing	B Bukan Milik Pribadi	C Mesin Dlm (5-20 GT)	C Siang dan Malam
12	Fransiskus	B Bukan Milik Pribadi	D Pancing	B Bukan Milik Pribadi	A Tanpa Motor	A Siang
13	P. Tahir Ahmad	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	C Siang dan Malam
14	Jupri Cambang	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	C Siang dan Malam
15	Lananong	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	C Siang dan Malam
16	Muh. Sadik	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	A Tanpa Motor	D Tidak menentu
17	Beddu Asse	B Bukan Milik Pribadi	B Pukat	B Bukan Milik Pribadi	C Mesin Dlm (5-20 GT)	C Siang dan Malam
18	Umar	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	A Tanpa Motor	C Siang dan Malam
19	Rahmani	B Bukan Milik Pribadi	B Pukat	B Bukan Milik Pribadi	C Mesin Dlm (5-20 GT)	B Malam
20	Muh. Ali	B Bukan Milik Pribadi	B Pukat	B Bukan Milik Pribadi	C Mesin Dlm (5-20 GT)	B Malam
21	Bustan Kasim	B Bukan Milik Pribadi	B Pukat	B Bukan Milik Pribadi	C Mesin Dlm (5-20 GT)	C Siang dan Malam
22	Muh. Tahir	A Milik Pribadi	B Pukat	A Milik Pribadi	C Mesin Dlm (5-20 GT)	C Siang dan Malam
23	Hasrulla	B Bukan Milik Pribadi	B Pukat	B Bukan Milik Pribadi	A Tanpa Motor	D Tidak menentu
24	Bakri B	A Milik Pribadi	B Pukat	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	C Siang dan Malam

Lanjutan Lampiran 6

No	Responden	Status Alat Tangkap	Jenis Alat Tangkap	Status Alat Transportasi	Jenis Perahu	Waktu Menangkap
25	H. M. Akib	A Milik Pribadi	A Purse Seiner	A Milik Pribadi	D Mesin Dlm (> 20 GT)	D Tidak menentu
26	Husen	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	C Mesin Dlm (5-20 GT)	B Malam
27	Awis	B Bukan Milik Pribadi	B Pukat	B Bukan Milik Pribadi	C Mesin Dlm (5-20 GT)	C Siang dan Malam
28	Mahmudin	A Milik Pribadi	E Bagan Perahu	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
29	Bahar	A Milik Pribadi	C Jala	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	C Siang dan Malam
30	Laco	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	A Tanpa Motor	C Siang dan Malam
31	Husba	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
32	Alimuddin	A Milik Pribadi	D Pancing	B Bukan Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
33	Abdullah Rivai Laco	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	C Siang dan Malam
34	Syahrul	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	A Tanpa Motor	C Siang dan Malam
35	Aminuddin	A Milik Pribadi	D Pancing	B Bukan Milik Pribadi	B Motor Tempel	A Siang
36	Arsyad	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	A Tanpa Motor	C Siang dan Malam
37	Yusuf	A Milik Pribadi	D Pancing	B Bukan Milik Pribadi	B Motor Tempel	C Siang dan Malam
38	Suardi	A Milik Pribadi	E Bagan Perahu	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	B Malam
39	Arifin Kangka	A Milik Pribadi	E Bagan Perahu	A Milik Pribadi	C Mesin Dlm (5-20 GT)	B Malam
40	Abd. Salam	B Bukan Milik Pribadi	A Purse Saine	A Milik Pribadi	D Mesin Dlm (> 20 GT)	C Siang dan Malam
41	M. Yunus Wero	A Milik Pribadi	C Jala	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	A Siang
42	Lasude	A Milik Pribadi	B Pukat	A Milik Pribadi	A Tanpa Motor	D Tidak menentu
43	Sudirman	A Milik Pribadi	B Pukat	A Milik Pribadi	A Tanpa Motor	B Malam
44	La Coe	A Milik Pribadi	C Jala	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	A Siang
45	Yakub	A Milik Pribadi	C Jala	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	A Siang
46	Kuraes Husain	A Milik Pribadi	C Jala	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	D Tidak menentu
47	Muh. Thamrin Temu	A Milik Pribadi	D Pancing	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	A Siang
48	Hj. Haryuti	A Milik Pribadi	E Bagan Tancap	A Milik Pribadi	B Motor Tempel	C Siang dan Malam

49	Saad	A	Milik Pribadi	E	Bagan Tancap	B	Bukan Milik Pribadi	B	Motor Tempel	B	Malam
50	Hj. Sri	A	Milik Pribadi	E	Bagan Tancap	A	Milik Pribadi	B	Motor Tempel	B	Malam

Lampiran 7 : Hasil Kuisioner berdasarkan Sarana TPI/PPI yang digunakan Responden

No	Responden	T4 Memasarkan Hasil Tangkapan		Lama Waktu Memasarkan		Daerah Pemasaran	
1	Lahabe	D	Pasar Tradisional	D	> 7 Jam	A	Lokal
2	Hamsi	C	Pengusaha	A	< 3 Jam	B	Wil. Ajattappareng
3	Rusdi	C	Pengusaha	A	< 3 Jam	B	Wil. Ajattappareng
4	Alimuddin	C	Pengusaha	A	< 3 Jam	B	Wil. Ajattappareng
5	Sakka	C	Pengusaha	B	3 - 5 Jam	B	Wil. Ajattappareng
6	Baharuddin	C	Pengusaha	B	3 - 5 Jam	B	Wil. Ajattappareng
7	Hamirullah	D	Pasar Tradisional	C	5 - 7 Jam	D	Keluar Wil. Ajattappareng
8	Burhan	C	Pengusaha	B	3 - 5 Jam	B	Wil. Ajattappareng
9	Lamalliweg	A	TPI	B	3 - 5 Jam	A	Lokal
10	Fandi	A	TPI	A	< 3 Jam	A	Lokal
11	Said	A	TPI	A	< 3 Jam	A	Lokal
12	Fransiskus	B	Langsung ke penjual	D	> 7 Jam	B	Wil. Ajattappareng
13	P. Tahir Ahmad	B	Langsung ke penjual	B	3 - 5 Jam	A	Lokal
14	Jupri Cambang	B	Langsung ke penjual	B	3 - 5 Jam	B	Wil. Ajattappareng
15	Lananong	B	Langsung ke penjual	B	3 - 5 Jam	A	Lokal
16	Muh. Sadik	D	Pasar Tradisional	B	3 - 5 Jam	A	Lokal
17	Beddu Asse	C	Pengusaha	A	< 3 Jam	A	Lokal
18	Umar	D	Pasar Tradisional	B	3 - 5 Jam	A	Lokal
19	Rahmani	C	Pengusaha	A	< 3 Jam	D	Keluar Wil. Ajattappareng
20	Muh. Ali	C	Pengusaha	A	< 3 Jam	D	Keluar Wil. Ajattappareng
21	Bustan Kasim	C	Pengusaha	A	< 3 Jam	D	Keluar Wil. Ajattappareng
22	Muh. Tahir	C	Pengusaha	A	< 3 Jam	D	Keluar Wil. Ajattappareng
23	Hasrulla	B	Langsung ke penjual	A	< 3 Jam	D	Keluar Wil. Ajattappareng
24	Bakri B	D	Pasar Tradisional	A	< 3 Jam	B	Wil. Ajattappareng

Lanjutan Lampiran 7

No	Responden	T4 Memasarkan Hasil Tangkapan	Lama Waktu Memasarkan	Daerah Pemasaran
25	H. M. Akib	C Pengusaha/saudagar	B 3 - 5 Jam	C Industri Lokal
26	Husen	B Langsung ke penjual	A < 3 Jam	A Lokal
27	Awis	C Pengusaha	A < 3 Jam	D Keluar Wil. Ajatappareng
28	Mahmudin	B Langsung ke penjual	A < 3 Jam	A Lokal
29	Bahar	B Langsung ke penjual	A < 3 Jam	A Lokal
30	Laco	D Pasar Tradisional	B 3 - 5 Jam	A Lokal
31	Husba	B Langsung ke penjual	A < 3 Jam	A Lokal
32	Alimuddin	B Langsung ke penjual	A < 3 Jam	A Lokal
33	Abdullah Rivai Laco	B Langsung ke penjual	A < 3 Jam	A Lokal
34	Syahrul	E Pinggir Laut / PPI	A < 3 Jam	A Lokal
35	Aminuddin	E Pinggir Laut / PPI	A < 3 Jam	A Lokal
36	Arsyad	B Langsung ke penjual	A < 3 Jam	A Lokal
37	Yusuf	B Langsung ke penjual	A < 3 Jam	B Wil. Ajattappareng
38	Suardi	B Langsung ke penjual	B 3 - 5 Jam	A Lokal
39	Arifin Kangka	C Pengusaha	A < 3 Jam	B Wil. Ajattappareng
40	Abd. Salam	C Pengusaha	A < 3 Jam	A Lokal
41	M. Yunus Wero	B Langsung ke penjual	B 3 - 5 Jam	B Wil. Ajattappareng
42	Lasude	D Pasar Tradisional	A < 3 Jam	A Lokal
43	Sudirman		A < 3 Jam	A Lokal
44	La Coe	B Langsung ke penjual	B 3 - 5 Jam	A Lokal
45	Yakub	B Langsung ke penjual	B 3 - 5 Jam	A Lokal
46	Kuraes Husain	B Langsung ke penjual	B 3 - 5 Jam	B Wil. Ajattappareng
47	Muh. Thamrin Temu	D Pasar Tradisional	A < 3 Jam	A Lokal
48	Hj. Haryuti	B Langsung ke penjual	A < 3 Jam	A Lokal
49	Saad	B Langsung ke penjual	A < 3 Jam	B Wil. Ajattappareng

50 | Hj. Sri | B | Langsung ke penjual | A | < 3 Jam | B | Wil. Ajattappareng

Lampiran 8

: INDUSTRI PERIKANAN KOTA PAREPARE

No	Nama Perusahaan	Nama Pemilik	Alamat	Tenaga Kerja		Nama Produksi	Kapasitas	
				L	P		Jumlah	Satuan
1	Nusantara	H. Abd. Karim	Jl. Mattirotasi No. 37	7	-	Reparasi Mesin Kapal	50	unit
2	US. Perikanan HMS 82	Hamzah D	Jl. Mattirotasi	18	5	Pengeringan Ikan	100,000	kg
3	Humas Mina Mitra	H. Muh. Asli Umar	Jl. Mayor Abdullah No.10	6	-	Industri Es Balok	500,000	kg
4	Siparennu	H. Fatma	Labukkang	3	-	Pengeringan Ikan	5,000	kg
5	PT. Harapan Mekar	H. Saenong HB	Jl. Kalimantan no. 33	28	-	Industri Galangan Kapal	5	buah
6	PT. Yanjung Pengharapan	H. Abd. Hannas Hindi	Jl. Kalimantan No. 37	24	-	Industri Galangan Kapal	5	buah
7	PT. Cahaya Makka Rennu	H. M. Sulaiman	Jl. Kalimantan	28	-	Industri Galangan Kapal	5	buah
8	PT. Tasmin	Drs. Abd. Haris Hindi	Jl. Kalimantan	6	-	Pemeliharaan Mesin Kapal	100	unit
9	Sinar Bahagia	Victor Pardi	Jl. Lasinrang	2	-	Industri Es Balok	480	Ton
10	KUD. Bersahaja	ST. Halimah	Mallusetasi	-	1	Pengeringan Ikan	500	kg
11	US. Iyanka	Iyanka	Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
12	US. Hasnawati	Hasnawati	Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
13	US. Tekke	Tekke	Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
14	US. Rahman	Abd. Rahman	Tonrangeng	-	1	Pengeringan Ikan	10,000	kg
15	US. Edi	Edi R	Tonrangeng	-	1	Pengeringan Ikan	10,000	kg
16	US. Akib	H. Akib	Tonrangeng	-	1	Pengeringan Ikan	10,000	kg
17	US. Mandawing	Mandawing	Tonrangeng	-	1	Pengeringan Ikan	10,000	kg
18	US. Suryanti	Suryanti	Tonrangeng	-	1	Pengeringan Ikan	10,000	kg
19	US. Salam	Salam	Tonrangeng	-	1	Pengeringan Ikan	10,000	kg
20	US. Nuriah	Nuriah	Jl. Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
21	US. Pesona	Pesona	Jl. Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
22	US. Sulastri	Sulastri	Jl. Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
23	US. Hartati	Hartati	Jl. Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
24	US. Mona	J. Mona	Jl. Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
25	US. Mudda	Mudda	Jl. Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
26	US. Sumiati	Sumiati	Jl. Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
27	US. Sadar	Sadar	Jl. Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
28	US. Baria	Baria	Jl. Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
29	US. Ramelly	Ramelly	Jl. Mattirotasi	1	-	Pengeringan Ikan	5,000	kg
30	US. Naje	Naje	Jl. Mattirotasi	-	1	Pengeringan Ikan	5,000	kg
31	US. Hudaya	Hudaya	Jl. Keterampilan			Abon Ikan		

32	US. Lela Mandiri	Lela	Jl. Pinsi			Abon Ikan		
----	------------------	------	-----------	--	--	-----------	--	--

Sumber : Dinas Perindag dan PMD Kota Parepare, Tahun 2006

Lampiran 9

**: DAFTAR NAMA KAPAL NELAYAN DAN KEBUTUHAN BBM (SOLAR)
UNTUK PPI CEMPAE KOTA PAREPARE TAHUN 2006**

NO	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KEBUTUHAN BBM/HARI/BULAN	FREKUENSI OPERASI/HARI	DAYA MESIN	OPERASI KERJA
1	KMN. Tiara	Sangkui	Tonrangeng	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	30 PK/20 ton	Selat Makassar
2	KMN. Cahaya Bugis	Sangkui	Tonrangeng	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	30 PK/20 ton	Selat Makassar
3	KMN. Kencana	Beddu Salam	Tonrangeng	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	30 PK/20 ton	Selat Makassar
4	KMN. Cari Penghidupan	H. Akib	Tonrangeng	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	30 PK/20 ton	Selat Makassar
5	KMN. Hasti	H. Samad	Kampung Baru	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	30 PK/20 ton	Selat Makassar
6	KMN. Wira Buana	Subait	Labungkan	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	30 PK/20 ton	Selat Makassar
7	KMN. Laris Manis I	Arifin	Sumpang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	30 PK/20 ton	Selat Makassar
8	KMN. Laris Manis II	Arifin	Sumpang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	30 PK/20 ton	Selat Makassar
9	KMN. Sabbarae	P. Yus	Sumpang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	30 PK/20 ton	Selat Makassar
10	KMN. Toni	Nyompa	Sumpang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	30 PK/20 ton	Selat Makassar
11	KMN. Cahaya Bulan	Aris	Kessi Pute	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
12	KMN. Pelni	Wa' Syarif	Kessi Pute	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
13	KMN. Beru-beru	H. Syamsuddin	Kessi Pute	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
14	KMN. Cahaya Atupe	H. Jusuf	Kessi Pute	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
15	KMN. Mandala	H. Yusuf	Kessi Pute	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
16	KMN. Babu Ni'Ma	H. Anto	Kessi Pute	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
17	KMN. Jumbo	H. Anto	Kessi Pute	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
18	KMN. Doa Restu	H. Idham	Kessi Pute	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
19	KMN. Budi Luhur	H. Muhtar	Kessi Pute	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
20	KMN. Gudang Garam	Rahman	Kampung Baka	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
21	KMN. Mutmainnah	Sadikin	Kampung Baka	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	35 PK/20 ton	Selat Makassar
22	KMN. Rembulan	Ibrahim	Kampung Baka	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	27 PK/15 ton	Selat Makassar
23	KMN. Jalur Reski I	Muh. Ali	Kampung Baka	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	27 PK/15 ton	Selat Makassar
24	KMN. Jalur Reski II	Muh. Ali	Kampung Baka	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	27 PK/15 ton	Selat Makassar
25	KMN. Bunga Indah	Tiar	Uj. Labuang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	27 PK/15 ton	Selat Makassar
26	PMN. Atupe	Bustam	Uj. Labuang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	27 PK/15 ton	Selat Makassar
27	PMN. Tabah	Mustafa	Uj. Labuang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	27 PK/15 ton	Selat Makassar
28	PMN. Citra Subur	Abd. Salam	Uj. Labuang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	27 PK/15 ton	Selat Makassar
29	PMN. Rahmat Ilahi	Muhammad	Uj. Labuang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	27 PK/15 ton	Selat Makassar
30	PMN. Harapan	Mistang	Uj. Labuang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	27 PK/15 ton	Selat Makassar

Lanjutan Lampiran 9

NO	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KEBUTUHAN BBM/HARI/BULAN	FREKUENSI OPERASI/HARI	DAYA MESIN	OPERASI KERJA
31	KMN. Mega Laut I	Syarifuddin	Labungkan	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	27 PK/15 ton	Selat Makassar
32	KMN. Mega Laut II	Syarifuddin	Labungkan	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
33	PMN. Nusantara	H. Umar	Lakessi	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
34	KMN. Pelita Mandar	Hasan	Lakessi	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
35	KMN. Nur Madinah	Saing	Lakessi	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
36	KMN. Restu	Pattaraga	Lakessi	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
37	KMN. Teluk Mandar	Wa' Alwi	Lakessi	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
38	KMN. Titipan I	La Sukri	Soreang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
39	KMN. Titipan II	La Sukri	Soreang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
40	KMN. Risma Sari	Wa' Dama	Soreang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
41	KMN. Pamuria	Subhan	Soreang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
42	KMN. Cahaya Mandar	Wa' Sodi	Soreang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	24 PK/10 ton	Selat Makassar
43	KMN. Maminasa	La Cuke	Tonrangeng	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	22 PK/10 ton	Selat Makassar
44	KMN. Nur Abadi	Tajuddin	Tonrangeng	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	22 PK/10 ton	Selat Makassar
45	KMN. Sukma Indah	La Basri	Sumpang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	22 PK/10 ton	Selat Makassar
46	PMN. Citra Mandar	Wa' Rasyid	Sumpang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	22 PK/10 ton	Selat Makassar
47	KMN. Bunga Waru	Abd. Rahim	Labungkan	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	22 PK/10 ton	Selat Makassar
48	KMN. Nurul Bahri	Ambo Tuwo	Labungkan	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	22 PK/10 ton	Selat Makassar
49	KMN. Cahaya Lestari	La Baco	Labungkan	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	22 PK/10 ton	Selat Makassar
50	KMN. Lintas Harapan	Muh. Iwan	Tonrangeng	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	23 PK/10 ton	Selat Makassar
51	KMN. Samudra	Husain	Soreang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	23 PK/10 ton	Selat Makassar
52	KMN. Sederhana I	Rusmin	Soreang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	23 PK/10 ton	Selat Makassar
53	KMN. Sederhana II	Rusmin	Soreang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	23 PK/10 ton	Selat Makassar
54	KMN. Bintang Lima	Harun	Tonrangeng	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	23 PK/10 ton	Selat Makassar
55	KMN. Tunas Muda	Erwin	Soreang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	23 PK/10 ton	Selat Makassar
56	KMN. Pamoria	Ishak	Soreang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	23 PK/10 ton	Selat Makassar
57	KMN. 99	Subair	Sumpang	90 ltr/1800 ltr	12 Jam	23 PK/10 ton	Selat Makassar
Total Kebutuhan/Hari/Bulan				5. 130 liter / 102.600 liter			

Sumber : Dinas PKPK Kota Parepare, Tahun 2006

Catatan :

- Jumlah kapal kemungkinan dapat bertambah

- Jumlah bulan beroperasi selama 1 tahun adalah 10 bulan
- Total kebutuhan BBM (solar) dalam 1 bulan adalah 102.600 liter

Lampiran 11

: BANYAKNYA RUMAH TANGGA PERIKANAN (RTP) BERDASARKAN KECAMATAN DAN JENISNYA DI KOTA PAREPARE TAHUN 2005

NO	KECAMATAN	PERIKANAN LAUT	PERIKANAN DARAT					JUMLAH
			DANAU	SUNGAI	RAWA	TAMBAK	KOLAM	
1	Bacukiki	202	-	-	1,2	40	2,5	242
2	Ujung	10	-	-	-	-	-	10
3	Soreang	113	-	-	-	20	-	133
Jumlah		325	-	-	12	60	2,5	385

Sumber: Dinas PKPK Bid. Perikanan dan Kelautan Kota Parepare, Tahun 2005